

SKRIPSI

KOMUNIKASI POLITIK PARTAI DENGAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Komunikasi Politik

Pada Partai Amanat Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan di

Kecamatan Serengan Surakarta



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SIGIT NUGROHO

D.1205584

**PROGRAM S-1 KOMUNIKASI NON REGULER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

PENGESAHAN

Telah diuji dan disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Januari 2010

Susunan Panitia Penguji :

Ketua : Drs. Haryanto, M.Lib ()
NIP. 196006131986011001

Sekretaris : Mahfud Anshori, S.Sos ()
NIP : 197909082003121001

Penguji I : Prof. Drs. H. Totok Sarsito, SU.MA ()
NIP. 194904281979031001

Penguji II : Drs.Kandyawan ()
NIP. 196104131990031002

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Dekan,

Drs.Supriyadi SN, SU
NIP. 195301281981031001

MOTTO

“Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus”

Thomas Carlyle

“A thousand men may build a city,
But it takes a *mother* to make a home”

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.
(QS : Ar-Ra'd (13) : 28)

PERSEMBAHAN

Sebuah karya kecil ini, kupersembahkan untuk :

Keluargaku

Bapak Drs.H. Mawardi dan Ibu Hj. Siti Isnandiyah, terima kasih atas semua kesabaran dan doanya yang tidak pernah terputus untuk anakmu ini, kakak dan kakak iparku yang selalu mendukung apapun jalan yang kupilih, dan Dyah Wiratni Hastuti atas semua doa dan dukungannya.

Almamater

FISIP UNS

Teman-teman Komunikasi Non-Reguler 2005

Kalianlah yang terbaik, terimakasih atas kebersamaan yang indah ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“KOMUNIKASI POLITIK PARTAI-ORMAS”** *Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Komunikasi Politik Pada Partai Amanat Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan Surakarta.*

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan kuliah Program S-1 Non Reguler Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Bagi sebagian orang, bahasan tentang politik mungkin merupakan sebuah bahasan yang membosankan dan sama sekali tidak menarik. Namun di balik dunia politik yang penuh intrik tersebut, dapat kita temukan beberapa hal yang menarik untuk disimak. Komunikasi politik adalah sebuah keniscayaan bagi kehidupan politik. Setiap pelaku politik dalam sebuah negara pasti melakukan politik, terlebih bagi sebuah partai politik. Partai politik melakukan komunikasi politik untuk berbagai macam tujuan serta dengan berbagai macam cara.

Komunikasi politik antara partai dengan organisasi kemasyarakatan adalah sebuah proses komunikasi yang unik. Hal ini disebabkan karena keduanya merupakan sebuah organisasi yang notabene memiliki visi dan misi masing-masing. Dalam karya tulis ini akan dibahas mengenai lika-liku proses komunikasi politik, faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor yang menghambat.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti ingin menjabarkan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat proses komunikasi politik antara Partai Amanat Nasional dengan organisasi kemasyarakatan.

Meskipun penulisan skripsi ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi penulis, namun peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Berbagai keterbatasan dalam penelitian skripsi ini merupakan bukti bahwa penulis merupakan manusia biasa yang masih harus belajar. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Universitas Sebelas Maret Surakarta pada umumnya, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi, saya sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini.
2. Bapak Drs. Totok Sarsito, SU.MA, selaku pembimbing I, yang senantiasa sabar dan penuh kepatuhan dalam memberikan bimbingan untuk penulisan skripsi ini.
3. Drs. Kandyawan, selaku pembimbing II, yang selalu menjadikan sesi bimbingan menjadi sesi mengobrol yang menyenangkan.
4. Kepada Almamater FISIP UNS, khususnya Komunikasi Non-Reguler angkatan 2005 kelas B, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, hidup Brotherhood Communication, waktu bersama kalian sungguh menyenangkan. Jangan putus tali silaturahmi ini.

5. Untuk teman-teman Fotografi, baik yang komersil maupun hobiis, terimakasih sudah membuatku semakin tidak bisa lepas dari dunia fotografi ini, meski harus kutebus dengan molornya kelulusanku ini. Sukses buat kalian.
6. Untuk klan KIM CAMP, saking banyaknya sampai tidak bisa ditulis semua, terima kasih banyak, dari mas-mas dulu sampai ke generasi sekarang....terima kasih atas bimbingannya.
7. Kepada Partai Amanat Nasional, khususnya DPC Serengan serta mas-mas aktivis organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Serengan, terimakasih atas bantuannya.
8. Dan semua orang yang telah begitu banyak memberikan inspirasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang belum disebutkan namanya, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga.

Semoga dengan segala bantuan yang telah diberikan, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan, skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Akhir kata penulis mengharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Medio November 2009

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori	6
1. Komunikasi Politik	6
2. Partai Politik	12
3. Organisasi Kemasyarakatan	15
4. Partai dan Komunikasi Politik.....	18
E. Definisi Konseptual.....	19
G. Metodologi Penelitian	22
1. Metode Penelitian.....	22
2. Subyek Penelitian.....	23
3. Teknik Pengumpulan Data	24
4. Populasi dan Sampel Penelitian	26
5. Teknik Analisis Data	27
6. Validitas data	28
H. Sistematika Penulisan	30

BAB II	DESKRIPSI LOKASI	31
A.	Lokasi Penelitian	31
B.	Partai Amanat Nasional.....	33
B.1.	Sejarah Partai Amanat Nasional	34
B.2.	Logo Partai Amanat Nasional	36
B.3.	Partai Amanat Nasional DPC Serengan	37
C.	Organisasi Masyarakat di Kecamatan Serengan	39
D.	Tinjauan Umum Hubungan Partai politik – Organisasi Masyarakat di Indonesia	41
BAB III	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
	Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional - Organisasi	
	Masyarakat di Kecamatan Serengan Surakarta	51
A.	Pengantar	51
B.	Gambaran Umum Hubungan Komunikasi Politik PAN-Organisasi	
	Masyarakat Kecamatan Serengan	57
C.	Realitas Hubungan Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional –	
	Organisasi Masyarakat di Kecamatan Serengan Surakarta	67
D.	Faktor-faktor Yang mempengaruhi Komunikasi Politik Parpol dengan	
	Organisasi Masyarakat	70
D.1.	Faktor-Faktor Pendukung	73
D.1.1	Faktor-Faktor Pendukung dari Parpol	73
D.1.2	Faktor-Faktor Pendukung dari Ormas	80
D.2.	Faktor-Faktor Penghambat	84
D.2.1	Faktor-Faktor Penghambat dari Parpol	84
D.2.2	Faktor-Faktor Penghambat dari Ormas	90
D.2.3	Faktor-Faktor Penghambat dari Pemerintah	94
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	110
A.	Kesimpulan	110

B. Rekomendasi115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

SIGIT NUGROHO, D1205584, “KOMUNIKASI POLITIK PARTAI-ORMAS” *Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Komunikasi Politik Pada Partai Amanat Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan Surakarta, Skripsi, Program S-1 Komunikasi Non Reguler, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009*

Komunikasi politik merupakan hal yang krusial dalam kehidupan politik pada sebuah negara. Melalui komunikasi politik terjadi proses transfer ide, informasi, serta gagasan antara pihak penguasa dengan masyarakat dalam kaitannya untuk mengelola kehidupan bernegara bersama-sama. Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam kehidupan politik. Keberadaan organisasi kemasyarakatan bagi partai politik sangat penting karena dapat berperan sebagai mitra politik, maupun sebagai sumber suara bagi partai politik. Proses komunikasi politik antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan tidak selalu berjalan lancar, seringkali ada faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses komunikasi politik tersebut. Maka dari itu munculah pertanyaan ‘*Faktor-faktor apa sajakah yang berperan dan berpengaruh dalam proses hubungan komunikasi politik antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan Surakarta*’

Untuk menganalisa hal tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan yang berupa wawancara dan pengumpulan data-data, serta kroscek kepada pihak partai politik, dalam hal ini adalah PAN, dengan organisasi kemasyarakatan yang berada dalam lingkup kecamatan Serengan. Selain itu juga dengan mencari informasi melalui media-media seperti surat kabar maupun internet demi menggali informasi yang lebih luas.

Dari hasil studi lapangan terhadap Partai Amanat Nasional DPC Serengan dan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang berada di dalam lingkup Kecamatan Serengan, maka dapat dirumuskan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses komunikasi politik antara keduanya. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berupa faktor pendukung saja, namun juga faktor-faktor yang menghambat kelancaran proses komunikasi politik tadi.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif, yang lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman (*understanding*) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas sosial bisa terjadi.

Dalam membangun komunikasi politik yang baik dengan organisasi kemasyarakatan, partai politik perlu mengoptimalkan fungsi-fungsinya dan juga menganalisa kembali apa saja kekurangan yang mereka miliki, untuk kemudian memperbaikinya. Selain itu, dari pihak organisasi kemasyarakatan sendiri juga harus kooperatif dan aktif memulai komunikasi dengan partai politik. Proses komunikasi politik yang lancar adalah salah satu kunci kesuksesan demokrasi.

ABSTRACT

SIGIT NUGROHO, D1205584, “KOMUNIKASI POLITIK PARTAI-ORMAS” *Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Komunikasi Politik Pada Partai Amanat Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan Surakarta*, **Skripsi, Program S-1 Komunikasi Non Reguler, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009**

Political communication is crucial in the political life of a country. Political communication occurs through the transfer of ideas, information, and ideas between the public authorities in relation to managing the state's life together. A community organization is one component of political life. The existence of social organizations for political parties is very important because it can act as a political partner, as well as a source of votes for political parties. The process of political communication between the political parties with community organizations do not always go smoothly, there are often factors that influence the course of the political communication process. Therefore munculah question 'What factors are the role and influence in the process of political communication between the Partai Amanat Nasional (PAN) with Community Organizations in Sub Serengan Surakarta'

To analyze it, then conducted field research in the form of interviews and data collection, and crosscheck to the political parties, in this case is the PAN, with community organizations that are covered by the district Serengan. In addition, by seeking information through media such as newspapers or the internet in order to dig more extensive information.

From the results of field studies of the Partai Amanat Nasional Serengan DPC and a number of community organizations that are within the scope of Sub Serengan, then formulated a number of factors that affect the process of political communication between the two. These factor not only a supporting factor, but also the factors which hamper this process of political communication.

This research is descriptive by using qualitative analysis approach, which is more intended to bring a picture and / or comprehension (understanding) of how and why of a phenomenon or social reality can occur.

In building good political communication with community organizations, political parties need to optimize their functions and also analyzes the return whatever shortcomings they have, and then fix it. In addition, the part of the community organizations themselves also need to cooperate and actively initiating communication with political parties. Political communication process smoothly is one of the key to success of democracy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Reformasi yang dimulai pada 1998 merupakan tonggak bagi bangsa Indonesia dalam perubahan kehidupan berpolitik. Tumbangnya rezim otoritarian Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun pada 21 Mei 1998, menandai terjadinya perubahan bagi kehidupan politik bangsa Indonesia. Selama 32 tahun rezim Soeharto berkuasa, pemerintah telah menekan keberadaan partisipasi masyarakat dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang keduanya merupakan elemen dasar demokrasi. Sejak awal Abraham Lincoln telah menyatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedua elemen tadi (partisipasi rakyat dan HAM) menjadi dasar bagi adanya jaminan terhadap rakyat untuk turut berperan serta secara aktif dalam proses pemerintahan demokrasi. Dengan menekan keberadaan atau bahkan penghilangan sama sekali kedua elemen dasar tadi, pantas dipertanyakan demokrasi macam apa yang dijalankan Indonesia selama 32 tahun rezim Soeharto berkuasa. Perubahan terpenting yang terjadi dalam kehidupan berpolitik Indonesia pasca reformasi 1998 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Sekalipun dicalonkan dari partai politik atau gabungan partai politik, namun individu pemilih tetap merupakan penentu. Pemilih bertindak sebagai subyek yang otonom atau independen.

Secara konsepsional, untuk mewujudkan demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, diperlukan setidaknya dua syarat: pertama, terselenggaranya Pemilu yang fair dengan didukung oleh kapasitas politik yang memadai dari rakyat. Kedua, adanya partisipasi aktif rakyat dalam proses dan kegiatan politik pasca Pemilu, seperti keterlibatan dalam penentuan kebijakan politik.¹

Partisipasi rakyat dalam proses demokratisasi tidak hanya sebatas mengikuti Pemilu saja, melainkan juga dalam proses dan kegiatan pasca Pemilu, karena partisipasi rakyat yang tinggi dalam Pemilu saja tidaklah cukup untuk menjadi jaminan terwujudnya akuntabilitas pemerintahan. Keterlibatan rakyat dalam proses pengawasan adalah suatu hal yang dibenarkan, meskipun secara politik ada wakil-wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan yang bertugas mengontrol kerja pemerintah, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Dalam mengontrol para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif (DPR dan DPRD) dapat dilakukan salah satunya melalui akses partai politik, karena partai politik merupakan kendaraan yang dipakai para wakil rakyat tadi untuk mendapatkan kursinya di DPR/D melalui proses Pemilu, sehingga partai berkewajiban untuk mengontrol kinerja wakil rakyat sebagai wakil partai atau wakil dari konstituen partai yang bersangkutan. Sebenarnya dengan langkah ini akan menguntungkan DPR/D dan partai politik yang bersangkutan, karena rakyat ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan proses kehidupan politik negara ini, inilah yang disebut dengan membangun komunikasi politik antara wakil dan

¹ Seymour Martin Lipset , 1959. *Political Man: The Social Bases of Politics*. Dalam *Punishment Votes : Warning bagi elit politik*. Hary Wahyudi, MSi. Anggota Forum Kajian Ambtenaar Pemerintah Propinsi Jawa Timur. www.d-infokom.go.id

konstituennya. Melalui komunikasi politik ini, aspirasi dari masyarakat, baik berupa tuntutan, masukan, dukungan, ataupun protes dapat dihimpun.

Konstituen sebuah partai politik dapat berupa masyarakat dengan beragam latar belakang sosial. Masyarakat dengan keberagaman tersebut dapat merupakan masyarakat yang berdiri sendiri (tanpa bergabung dengan organisasi), namun seringkali masyarakat tersebut bergabung dengan sebuah organisasi kemasyarakatan berdasarkan dengan tingkat persamaan kehidupan sosial mereka, seperti agama, pekerjaan, pendidikan, atau persamaan-persamaan sosial lainnya. Adalah sebuah keniscayaan bagi partai politik untuk mengabaikan keberadaan organisasi masyarakat sipil ini. Agar terbangun atau untuk memperkuat hubungan dengan organisasi masyarakat sipil, partai politik perlu mengenali komposisi sosial dari anggota dan pemilihnya sendiri.

Partai politik mewakili masyarakat atau kepentingan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Partai politik mengumpulkan dan mengartikulasikan kepentingan tersebut dan mengintegrasikan ke dalam program-program yang akan diusungnya. Sudah barang tentu program partai tidak bisa terlepas dari pengaruh organisasi masyarakat (ormas) sipil, seperti asosiasi bisnis, serikat buruh, organisasi agama, atau LSM.

Pada umumnya partai politik mencerminkan perbedaan atau pembelahan sosial (cleavages) seperti kelas, agama, suku atau daerah. Akan tetapi faktor-faktor lain juga berpengaruh, seperti pekerjaan dan pendapatan atau pendidikan. Suatu model lain adalah *catch-all party* yang tidak menitik beratkan isu-isu

identitas dan ideologi. Bagaimanapun, partai membutuhkan hubungan yang erat dan kuat dengan masyarakat sipil.²

Hal tersebutlah yang menjadikan keinginan untuk melakukan studi lapangan dalam rangka menggali lebih dalam tentang informasi dari lapangan dan kemudian menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang berperan dan berpengaruh dalam proses komunikasi politik antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu elemen kuat konstituen partai politik tersebut.

Komunikasi politik mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik; dan hasil pemrosesan itu, yang tersimpul dalam fungsi output, dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi feed back sistem politik.³

Pemilu 2009, meskipun masih 1 tahun lagi, namun mulai terasa gaungnya. Partai-partai baru bermunculan, meskipun ada yang hanya merupakan daur ulang dari partai lama yang tidak lolos sertifikasi pada Pemilu yang lalu. Masa mendekati Pemilu seperti ini merupakan saat yang tepat untuk mengamati kinerja partai politik dalam kaitannya melakukan komunikasi politik dengan konstituennya. Berbagai *political movement* mulai dilakukan oleh partai politik, seperti mengadakan silaturahmi antar partai serta bergabung untuk mendukung salah satu kandidat dalam sebuah Pilkada. Pada masa seperti ini, strategi partai untuk mendekati konstituennya mulai tampak, hal ini dalam rangka meraih

² ARSIP, *Hubungan antara Partai Politik dengan Organisasi Masyarakat Sipil*, www.forum-politisi.org

³ Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991. hlm 1

simpati serta dukungan dalam Pemilu nanti. Berbagai strategi dan siasat dilakukan partai politik untuk mendapat simpati yang sebesar-besarnya dari masyarakat.

Dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik Partai dengan Ormas penulis mengambil studi kasus Partai Amanat Nasional di Kecamatan Serengan Surakarta. Diambilnya Partai Amanat Nasional sebagai subyek dalam penelitian ini bukannya tanpa alasan, salah satu alasan yang utama adalah Kecamatan Serengan sendiri yang terkenal sebagai salah satu basis massa Partai Amanat Nasional di Kota Surakarta.

Partai Amanat Nasional sebagai salah satu partai yang didirikan oleh pelopor gerakan reformasi 1998, Amien Rais, tidak menuai hasil yang memuaskan dalam Pemilu terdahulu. Amien Rais sebagai pendiri Partai Amanat Nasional yang maju dalam perebutan kursi kepresidenan pada Pemilu yang lalu akhirnya harus kalah pada putaran kedua Pilpres 2004 kemarin. Menarik untuk disimak bagaimana pola-pola komunikasi politik yang dilakukan Partai Amanat Nasional DPC Serengan dengan konstituennya termasuk dengan organisasi masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Serengan

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

“ Faktor-faktor apa sajakah yang berperan dan berpengaruh dalam proses hubungan komunikasi politik antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan Surakarta? ”

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang berperan dalam hubungan komunikasi politik Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan Surakarta
2. Untuk mengetahui sejauh manakah faktor-faktor tersebut berpengaruh dalam hubungan komunikasi politik Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan Surakarta
3. Untuk mencoba mencari solusi bagi penyelesaian masalah komunikasi politik tersebut.

D. KERANGKA TEORI

D.1. Komunikasi Politik

Sebagai makhluk sosial yang memiliki kebudayaan, manusia selalu berinteraksi, berelasi dan bertransaksi dengan orang lain, oleh sebab itu pada hakikatnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup, entah itu kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, ataupun kebutuhan psikologi, manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Hal itu dapat terpenuhi melalui sebuah proses komunikasi timbal balik antar manusia. Dalam kehidupan politik juga tidak pernah bisa luput dari komunikasi. Proses komunikasi selalu dibutuhkan oleh para pelaku politik, birokrat pemerintah (eksekutif), praktisi politik (legislatif), serta rakyat.

Secara umum, komunikasi politik dapat dilihat sebagai suatu kajian yang mempertemukan dua disiplin ilmu, yaitu ilmu komunikasi dan ilmu politik. Setiap ilmu menunjukkan karakteristiknya sendiri-sendiri, seperti ilmu komunikasi yang lebih menekankan pada kajian muatan materi pesan, yaitu pesan-pesan politik yang berlangsung dalam lingkup sistem politik. Sedangkan ilmu politik lebih memfokuskan kepada permasalahan politik dan pemerintahan sebagai suatu nilai yang terus berlanjut dengan menggunakan komunikasi untuk kegiatannya.⁴

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa latin “*communicare*” yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. **Carl I Hoveland**, mengatakan bahwa: “*communication is a process by which an individual transmit stimuli (usually verbal symbol) to modify the behavior of another individuals*”⁵

Dari definisi di atas, tampak bahwa komunikasi adalah suatu proses menstimulasi dari seorang individu terhadap individu lain. Yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti, biasanya berbentuk kata untuk mengubah tingkah laku orang lain.

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk menyampaikan suatu pemikiran atau pesan dari seseorang kepada orang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, **Edwin Emery** berpendapat sebagai berikut:

“*Communication is the art of transmitting information, ideas, and attitude*

⁴ Soemarno, A.P dan Didi Suhandi. *Pengantar Studi Komunikasi Politik*. Orba Sakti. Bandung. Hlmn 1

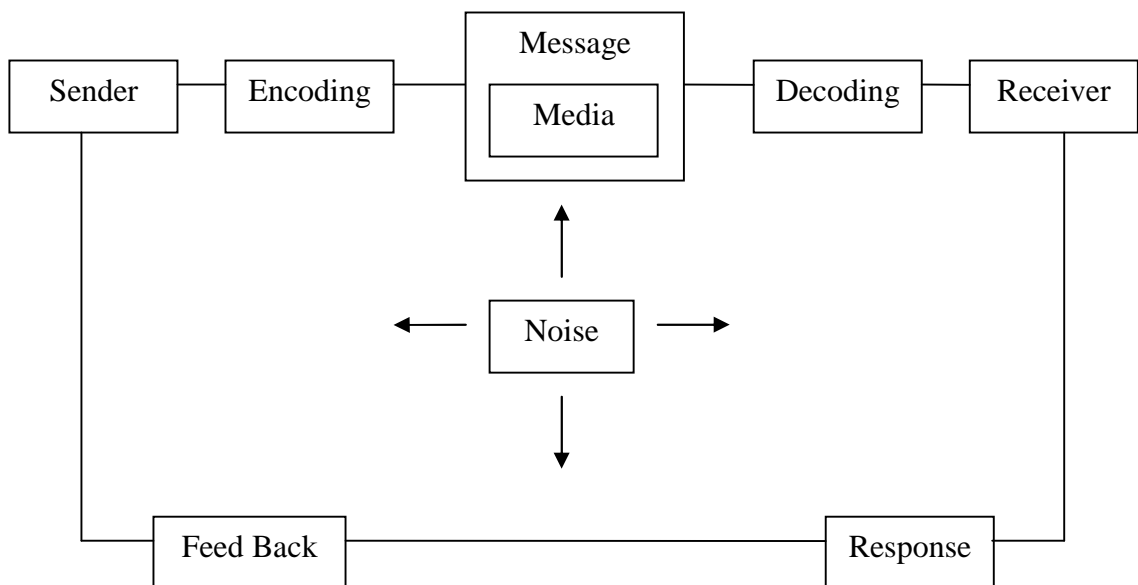
⁵ C.I. Hoveland, *Social Communication. Proceeding of the American Philosophical Society*. Vol 9. 1948. dalam *Pokok-Pokok Dasar Ilmu Publisistik* oleh Drs. R. Roekomy. 1971. hlmn 9

from one to another”⁶. Dalam hal ini, komunikasi tidak hanya dipandang sebagai suatu proses hubungan dengan orang lain saja, namun memuat suatu perwujudan gagasan ide-ide seseorang yang secara bebas disampaikan kepada orang lain.

Menurut **Harold Laswell**, komunikasi sebagai proses dapat dijelaskan melalui sebuah bagan sebagai berikut⁷ :

Bagan 1.1

Proses Komunikasi (Harold Laswell)



Dimana :

- **Sender** : Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang.

⁶ Agee.W.K.H.H. Ault.E.Emery. *Introduction to Mass Communication*. 10th edition. Dood Meadand Company. New York – Toronto.hlmn 40

⁷ Harold Laswell dalam Prof. Drs Effendi, O.U, M.A. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlmn 18-19

- **Encoding** : Penyandian, yaitu proses pengartian pesan kedalam bentuk lambang-lambang.
- **Message** : Pesan yang merupakan seperangkat lambang yang bermakna yang disampaikan oleh komunikator
- **Media** : Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator ke komunikan.
- **Decoding** : Pengawasandian, yaitu proses komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya.
- **Receiver** : Komunikan, yang menerima pesan dari komunikator
- **Response** : Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan.
- **Feed back** : Umpan balik, tanggapan dari komunikan yang disampaikan pada komunikator
- **Noise** : Gangguan yang tak terencana yang terjadi dalam proses penerimaan pesan, sehingga merubah esensi pesan yang dimaksud

Sedangkan **Dennis McQuill** berpendapat bahwa : ⁸

“Komunikasi adalah siapakah yang melakukan komunikasi dan kepada siapa komunikasi itu ditujukan (sumber dan penerima), mengapa orang berkomunikasi (saluran, bahasa, dan kode), komunikasi itu menyangkut apa (isi, objek, acuan, tipe informasi), dan apakah konsekuensi komunikasi disengaja atau tidak disengaja.”

⁸ Dennis McQuill, *Teori Komunikasi Massa*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1991. hlmn 7

Hampir senada, **Harold Lasswell** mengemukakan bahwa: *komunikasi adalah tentang siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa.*⁹

Berdasarkan batasan teori komunikasi yang telah diuraikan diatas, maka subyek yang ditekankan adalah pada komunikasi yang berwacana politik. Menyangkut komunikasi politik, **Dan Nimmo**¹⁰ melihat politik seperti komunikasi yakni sebagai suatu proses, dan komunikasi seperti politik yang melibatkan pembicaraan. Nimmo menekankan bahwa komunikasi politik bukan saja pembicaraan dalam arti sempit seperti kata-kata yang diucapkan melainkan pembicaraan dalam arti inklusif yang meliputi segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang ditulis dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian.

Dalam uraian ini, Nimmo berusaha menjelaskan makna konsep yang dapat ditangkap bahwa komunikasi politik berusaha menempatkan maknanya sebagai proses komunikasi yang terjadi pada setiap interaksi politik. Ia juga menekankan bahwa komunikasi politik memiliki perspektif komunikasi yakni adanya komunikator politik, ada media politik, ada pembicaraan politik, serta khalayak dan efek dari komunikasi tersebut.

Komunikasi politik sebagaimana komunikasi lainnya, membutuhkan pengirim, pesan-pesan, dan penerima. Komunikasi politik tidak hanya berupa naskah tertulis atau lisan, simbol atau sinyal dengan saluranyang meneruskan

⁹ Harold Lasswell, *The structure and function of communication in society*, dalam Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, komunikator pesan, dan Media*, PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2005

¹⁰ Dan Nimmo. *Komunikasi Politik : Komunikator, Media, dan Pesan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.2005

arti atau pesan. Melalui komunikasi, pikiran politik dapat dipertemukan karena pada hakekatnya segala pikiran itu harus ada yang menyampaikan (communicator), melalui pesan (message), dan akhirnya ada yang menerima atau menanggapi (communicant).¹¹

Di dalam komunikasi politik, komunikator memerankan peran sosial yang utama karena komunikator berusaha untuk menyampaikan pesan politik yang sengaja dilakukan untuk membuat komunikan berperilaku tertentu sesuai dengan kemauan sang komunikator.

Komunikasi politik mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik; dan hasil pemrosesan itu, yang tersimpul dalam fungsi output, dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi feed back sistem politik.¹²

Dalam proses komunikasi politik antara partai dengan konstituennya, media yang dapat digunakan adalah forum tatap muka secara langsung atau bisa juga melalui media massa, baik itu media massa cetak maupun media massa elektronik, seperti radio, televisi, internet, surat kabar, buletin partai, dan lain sebagainya.

Dari berbagai definisi dan batasan-batasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi politik adalah

“pernyataan dan tindakan politik dari komunikator yang berupa transmisi

¹¹ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru Algasindo. Bandung. 1999. hlm 61

¹² Alfian. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991. hlm 1

pesan yang disampaikan untuk mengubah sikap, perilaku, dan prinsip politik komunikasi melalui media tertentu dan menimbulkan efek berupa feed back dari komunikasi.”

D.2. Partai Politik

‘ Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang beraksi untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain lain yang mempunyai pandangan berbeda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas’,¹³

Eksistensi partai politik dalam sebuah sistem demokrasi adalah sebuah keniscayaan, karena upaya demokratisasi membutuhkan sarana atau saluran politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disuatu negara penganut sistem demokrasi tersebut. Partai politik adalah salah satu sarana yang dimaksud, dimana partai politik memiliki ragam fungsi, platform/program kerja, dan dasar pemikiran. Fungsi dan platform/program kerja parpol itulah yang salah satunya bisa dijadikan pertimbangan untuk menilai demokratis atau tidaknya suatu pemerintahan. Dalam sistem demokrasi partai politik

¹³ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999

mempunyai beberapa fungsi yang penting dan utama, antara lain fungsi rekrutmen, pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang yang layak untuk menduduki posisi-posisi di legislatif maupun eksekutif (seleksi kandidat) atau sebagai pengurus partai, pengumpulan dan artikulasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dan integrasi kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam satu program politik.¹⁴ Dengan ini partai politik berfungsi sebagai “jembatan” antara masyarakat dan sistem politik yang memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Individu-individu dan kelompok-kelompok warga (organisasi kemasyarakatan) dilibatkan dalam sistem politik melalui partai politik. Dengan demikian partai politik memberikan legitimasi dan dapat memperkuat stabilitas demokrasi. Agar mampu melaksanakan fungsi-fungsi tersebut partai politik perlu bersifat terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Dengan terbukanya partai politik, individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat dapat menyuarakan kepentingan dan tuntutan mereka. Akan tetapi, pada umumnya jumlah penduduk yang menjadi anggota partai politik dan yang terlibat secara aktif dalam partai politik sangat kecil, oleh karenanya sangat penting adanya komunikasi timbal balik; dari partai ke masyarakat dan dari masyarakat ke partai.

Menurut **Maurice Duverger**, fungsi Partai Politik adalah :¹⁵

1. Pendidikan Politik (*Political Education*)
2. Seleksi Politik (*Political Selection*)

¹⁴ ARSIP. *Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Partai Politik*. www.Forum-Politisi.org.

¹⁵ Maurice Duverger, *Political Parties*, 1967, Methuen, London. Dalam *Pengantar Ilmu Politik, wawasan Pemikiran dan Kegunaannya* Drs.T. May Rudy, S.H, MIR.,M.SC. PT. Refika Aditama 2003. hlm 92

3. Penghimpunan (kegiatan) politik (*Political Agregation*)
4. Saluran Pernyataan Kepentingan (*Interest Articulation*)
5. Pengawasan/pengendalian politik (*Political Control*)
6. Komunikasi Politik (*Political Communication*)

Apa yang telah di katakan oleh *Soltou*, bahwa Parpol merupakan sekelompok manusia yang terorganisir sebagai suatu kesatuan politik yang memanfaatkan kekuasaan pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum, mungkin sudah tidak relevan lagi jika dikontekskan dengan realitas politik saat ini. Parpol yang semestinya menjadi tempat kolaborasi berbagai insan sebagai makhluk *zoon politicon*, dengan dukungan empat aspek dalam diri manusia, yaitu aspek biologis (mempertahankan hidup), aspek psikologis (menghilangkan kejenuhan), aspek kultural (untuk mendapat dukungan) dan aspek ekonomi (untuk memenuhi kebutuhan), telah tersingkirkan oleh nafsu serakah manusia. Parpol bisa menjadi warna atau media bagi jalannya proses demokratisasi, tapi parpol juga bisa membuat segala macam manipulasi dalam sistem politik yang menghilangkan makna demokrasi.

Partai politik muncul sebagai wujud dari interaksi pemerintah dengan rakyat, dimana untuk itu diperlukan sebuah kendaraan politik yang diasumsikan sebagai mampu untuk menjaga simbiosis antara keduanya. Partai politik merupakan produk dari masyarakat yang modern, karena pada

masyarakat tradisional yang struktur masyarakatnya masih cenderung kaku tidak membutuhkan sebuah partai politik.

Menurut Haryanto, dapat ditarik garis kesimpulan bahwa partai politik pada hakekatnya adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang punya cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama; dimana organisasi ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan; yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.¹⁶

D.3. Organisasi Kemasyarakatan

Pembangunan Indonesia membutuhkan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat. Sangat kecil efektifitasnya apabila partisipasi masyarakat tersebut dilakukan secara individu, atau dengan kata lain masyarakat harus bersatu dalam sebuah wadah agar partisipasinya dapat lebih terarah dan terurus. Dalam hal ini berkumpul dan bersatu dalam sebuah organisasi adalah salah satu pilihan yang paling masuk akal. Mengenai hak atas kebebasan berkumpul ini, seperti yang disebutkan dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,¹⁷ diantaranya tertuang dalam:

¹⁶ Haryanto. *Partai Politik : Suatu Tinjauan Umum*. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 1984. hlm11

¹⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999

1. Amandemen UUD 1945 Pasal 28E butir ketiga, yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.

2. Declaration of Human Rights, Pasal 20:
 - (1) *Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat.*
 - (2) *Tiada seorangpun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan*

3. Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 21:

“ Hak berkumpul secara bebas diakui. Tiada satu pembatasanpun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain.”

Organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan yang relatif stabil diantara perseorangan dan subkelompok. Ada dua macam

organisasi, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Dalam organisasi informal hubungan antar pribadi dalam organisasi itu berlaku secara spontan dan berlangsung melalui pengertian bersama, aturan yang tidak diucapkan, ritual, dan tradisi. Sebaliknya, organisasi formal memiliki aturan dan pengaturan yang tegas, kedudukan dalam organisasi yang ditetapkan secara teliti, dan hak serta kewajiban yang jelas bagi para anggotanya.

Pengertian tentang Organisasi Kemasyarakatan sendiri dengan jelas tercantum dalam Undang-Undang (UU) No 8 tahun 1985. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Lebih lanjut di dalam Undang-Undang no 8 tahun 1985 itu disebutkan bahwa fungsi Organisasi Kemasyarakatan adalah untuk:

1. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya
2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi
3. Wadah peran serta dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional
4. Sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan,

dan antara Organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan social politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Bentuk dari organisasi kemasyarakatan ini sendiri bermacam-macam. Masing-masing memiliki konsentrasi sendiri-sendiri sesuai dengan bidangnya. Front Pembela Islam, Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Pemuda Pancasila, Persatuan masyarakat Tionghoa, adalah segelintir dari banyaknya organisasi kemasyarakatan yang tumbuh subur ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tidak melulu Organisasi Kemasyarakatan selalu berorientasi pada salah satu partai politik, banyak Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak secara netral. Dengan banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang ada, menjadi sasaran empuk bagi Partai Politik untuk menjaring konstituen. Berbagai pendekatan dilakukan Partai Politik untuk merayu anggota Organisasi Kemasyarakatan tadi agar bersedia menjadi konstituen partai.

D.4. Partai dan Komunikasi Politik

Partai politik menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat dengan melakukan komunikasi politik. Sebagai pelaku komunikasi politik, Partai politik dapat berlaku sebagai komunikator, dapat juga berlaku sebagai komunikan. Partai politik sebagai komunikator ketika dia sedang menyampaikan program kerja, platform, garis kebijakan partai dan sejenisnya. Kemudian, partai politik bertindak sebagai komunikan ketika dia menerima masukan dari konstituennya, baik yang berupa dukungan,

tuntutan, maupun protes. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penghubung antara dua belah pihak, partai politik dapat menyalurkan arus informasi dari atas kebawah (dari Pemerintah kepada masyarakat) atau dari bawah ke atas (menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah). Tipe komunikasi yang dilakukan partai juga ditentukan oleh heterogenitas konstituen. Biasanya jika heterogenitas konstituen sebuah partai semakin heterogen, maka komunikasi yang dilakukan berupa dialog, baik secara langsung maupun melalui perantara media massa, tergantung dari kuantitas massanya.

Image dari sebuah partai politik sangatlah penting, hal ini berkaitan dengan bagaimana partai politik tersebut di mata masyarakat umum sebagai calon pemilih. Membangun sebuah image partai politik niscaya dilakukan tanpa komunikasi politik. Komunikasi politik yang dimaksud disini adalah semua hal yang dilakukan partai politik untuk mentransfer sekaligus menerima umpan balik tentang isu-isu politik berdasarkan semua aktivitas yang dilakukan dalam masyarakat. Isu politik tersebut dapat berupa ideologi partai, program kerja partai, profil pemimpin partai, latar belakang pendirian partai, visi dan tujuan jangka panjang partai serta permasalahan-permasalahan yang diungkapkannya. Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai komunikasi dua arah. Dua arah berarti komunikasi tidak hanya dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat, namun juga dari masyarakat kepada partai politik. Hal ini sesuai dengan tujuan dasar komunikasi secara umum yaitu untuk membangun sebuah pengertian bersama akan suatu hal, karena tujuan komunikasi tidak akan terwujud sebelum kesamaan persepsi terjadi. Adanya

bias persepsi seringkali menjadi kendala utama sebuah partai politik tidak atau kurang mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Peran utama komunikasi politik adalah untuk mengurangi atau menghilangkan bias persepsi yang terjadi antara masyarakat dengan partai politik, sehingga apa yang diinginkan oleh sebuah partai dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat sebagai calon pemilih.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

E.1 Komunikasi Politik

Dalam penelitian ini digunakan definisi komunikasi politik sebagai suatu proses penginformasian timbal balik, yaitu penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator, berupa pernyataan dan tindakan, kepada komunikan, dan penyampaian informasi tersebut menimbulkan efek berupa feedback dari komunikan. Media komunikasi yang digunakan melalui forum tatap muka atau melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

E.2. Partai Politik

Partai politik pada hakekatnya merupakan sekelompok orang yang mempunyai suatu cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama; dimana organisasi ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan; yang kesemuanya itu pada gilirannya menjadi pangkal

tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.¹⁸

Pada umumnya terdapat dua model partai yang berbeda: partai kader (atau partai pemilih) dan partai anggota (atau massa). Partai kader tidak memiliki terlalu banyak anggota. Biasanya hanya pengurus atau kandidat direkrut oleh partai, bukan anggota biasa. Tingkat organisasi partai kader kurang tinggi. Partai ini lebih mementingkan sukses di pemilu, maka disebut partai pemilih. Jumlah pemilih dibanding jumlah anggota sangat tinggi, akan tetapi pada umumnya keterikatan pemilih pada partai tidak terlalu kuat. Seleksi kandidat biasanya melalui primaries (pemilu pendahuluan) yang sering melibatkan publik.

Partai anggota membutuhkan struktur dan organisasi yang lebih lengkap (dari tingkat lokal sampai nasional) dan kuat dibanding partai kader. Jumlah anggota tinggi dan keterikatan pada partai lebih kuat dan mendalam. Keterlibatan anggota dalam partai (seleksi kandidat, formulasi kebijakan) lebih tinggi dibanding partai kader dan bersifat bottom-up. Tingginya jumlah anggota dan aktifis merupakan suatu kelebihan partai anggota. Anggota adalah suatu sumber daya yang penting. Mereka membayar iuran, dapat dimobilisir pada masa kampanye secara gratis dan sukarelawan dan selalu berinteraksi dengan masyarakat dan mempromosikan program dan gagasan partainya. Oleh karenanya, politisi berasal dari partai anggota lebih dekat dengan pemilihnya.

¹⁸ Haryanto, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1984. hlm 4

E.3. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹⁹

Organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan politik memegang peran sebagai penghubung antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Dalam wahana yang disebut sistem politik, kedudukan organisasi kemasyarakatan berfungsi untuk mengartikulasikan berbagai kepentingan yang berasal dari masyarakat, yang kemudian kepentingan tersebut akan menjadi bahan masukan untuk penyusunan kebijakan publik. Permasalahan muncul ketika independensi organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat telah berpihak pada suatu kekuatan politik tertentu. Kondisi demikian dapat berakibat negatif pada pelaksanaan peran-perannya yang tidak akan berjalan dengan optimal, yaitu sebagai penyambung kepentingan (*interest*) antara suprastruktur dengan infrastruktur politik, sosialisasi politik dan edukasi politik.

G. METODOLOGI PENELITIAN

G.1. Metode Penelitian

¹⁹ Bab I Ketentuan Umum UU no 8 tahun 1985, Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai upaya untuk menggambarkan keadaan obyek penelitian. Metode deskriptif menurut Isaac dan Michael bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat²⁰.

Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Tujuan utamanya adalah menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat dilakukan penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²¹

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan untuk mengungkap rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara kerja yang sistemik, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat alamiahnya. Penelitian kualitatif tidak bekerja dengan menggunakan data dalam bentuk atau yang ditransformasikan menjadi bilangan atau angka, tidak diolah dengan rumus dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan statistik matematik.²²

²⁰ Jalalludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya Bandung, 2001, hal 22

²¹ CONSuello G Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal 71

²² Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hal 175

Penelitian deskriptif kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati²³.

G.2. Subyek Penelitian

G.2.1. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah terdiri dari dua kalangan, yaitu :

- DPC Partai Amanat Nasional Serengan
- Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Serengan Surakarta.

G.2.2. Level Analisis

Level analisis berkaitan dengan tingkat penelitian yang akan dilakukan, dimana yang ingin dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik antara Partai Amanat Nasional dengan Organisasi Kemasyarakatan di kecamatan Serengan Surakarta. Untuk level analisis penelitiannya dibagi dua, yaitu untuk DPC Partai Amanat Nasional Serengan level analisis yang akan dilakukan adalah tingkat institusi. Untuk Organisasi Kemasyarakatan juga akan dilakukan level analisis penelitian tingkat institusi. Jadi tidak akan dilakukan level analisis tingkat individu dalam penelitian ini.

G.3. Teknik Pengumpulan Data

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung, 1991

Data dipakai sebagai bahan baku dalam sebuah penelitian. Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Data tambahan dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Data yang baik adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya, up to date, dan bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah yang sedang diteliti.

Menurut sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat data atau informasi tersebut. Data primer dapat berupa kata-kata atau tindakan dari obyek yang diamati atau diwawancarai.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber sekunder yang memuat data atau informasi tersebut. Data sekunder dapat berupa dokumen yang terdiri dari sumber data tertulis, seperti majalah maupun surat kabar yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

G.3.1. Wawancara

Wawancara bukanlah sekedar omong-omong atau percakapan biasa, walaupun keduanya berupa interaksi verbal. Dalam wawancara diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan yang dirumuskan secara tajam, halus, dan tepat, serta kemampuan untuk menangkap buah pikiran orang lain secara cepat.²⁴

Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan dan dirasakan seseorang tentang berbagai aspek kehidupan. Wawancara dapat berfungsi deskriptif untuk melukiskan dunia kenyataan yang dialami oleh orang lain.

G.3.2 Pustaka atau Dokumentasi

Pemakaian studi pustaka adalah sebagai tahap awal dari penelitian agar lebih memahami akan permasalahan yang diteliti. Pemakaian metode studi pustaka dan dokumentasi ini adalah untuk menunjang kekuatan data-data yang telah diperoleh dari metode-metode yang digunakan sebelumnya.

G.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sekelompok orang dimana peneliti akan menggeneralisasikan hasil penelitiannya. Suatu populasi yang ditentukan setidaknya memiliki satu karakteristik yang membedakannya dari kelompok yang lain. Sedangkan sampel adalah diartikan sebagai item atau individu yang mewakili suatu populasi dimana dia diambil. Secara umum, semakin besar jumlah sampel yang diambil, maka akan semakin mewakili populasi tersebut, dalam artian semakin banyak pula karakteristik yang bisa diambil. Namun jika

²⁴ S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 114-115

tidak pun, maka setidaknya sampel dapat mewakili tiap-tiap komponen yang ada di populasi sehingga akan didapatkan generalisasi yang relatif kuat.

Pemilihan teknik pengambilan sampel merupakan upaya penelitian untuk mendapat sampel yang representatif (mewakili), yang dapat menggambarkan populasinya.²⁵ Teknik pengambilan sampel tersebut dibagi atas 2 kelompok besar, yaitu :

1. Probability Sampling (Random Sample)

Pada pengambilan sampel secara random, setiap unit populasi, mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Faktor pemilihan atau penunjukan sampel yang mana akan diambil, yang semata-mata atas pertimbangan peneliti, disini dihindarkan. Bila tidak, akan terjadi bias.

Dengan cara random, bias pemilihan dapat diperkecil, sekecil mungkin. Ini merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Keuntungan pengambilan sampel dengan probability sampling adalah sebagai berikut:

- Derajat kepercayaan terhadap sampel dapat ditentukan.
- Beda penaksiran parameter populasi dengan statistik sampel, dapat diperkirakan.
- Besar sampel yang akan diambil dapat dihitung secara statistik.

2. Non Probability Sampling (Non Random Sample)

²⁵ Anggraini Sri, "*Populasi dan Sampel*", Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta, 1979

Pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip probability. Pemilihan sampel tidak secara random. Hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan. Cara ini dipergunakan : Bila biaya sangat sedikit , hasilnya diminta segera, tidak memerlukan ketepatan yang tinggi, karena hanya sekedar gambaran umum saja.

Cara-cara yang dikenal adalah sebagai berikut :

- Sampel Dengan Maksud (Purposive Sampling).

Pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan penelitiannya saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil.

- Sampel Tanpa Sengaja (Accidental Sampling).

Sampel diambil atas dasar seandainya saja, tanpa direncanakan lebih dahulu. Juga jumlah sampel yang dikehendaki tidak berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan, asal memenuhi keperluan saja. Kesimpulan yang diperoleh bersifat kasar dan sementara saja.

- Sampel Berjatah (Quota Sampling).

Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja, hanya disini besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu. Cara ini dipergunakan kalau peneliti mengenal betul daerah dan situasi daerah dimana penelitian akan dilakukan.

Di dalam penelitian ini akan dipergunakan Non Probability Sampling dengan cara purposive sample atau atas dasar kehendak peneliti saja dengan mengambil

sampel dan populasi Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Serengan. Andaikata tidak dapat diambil secara keseluruhan maka akan diambil sampel sesuai dengan tipe organisasi dan bidang yang dirambah oleh organisasi tersebut. Nantinya akan dipilih organisasi yang benar-benar sudah settle, baik secara anggota maupun secara keorganisasian, sehingga akan didapat data-data yang cukup bisa mewakili keberadaan seluruh organisasi masyarakat sipil yang ada di Kecamatan Serengan tersebut.

G. 5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satu urutan dasar.²⁶ Untuk menganalisa data dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan ini, analisa dilakukan sejak pengumpulan data lapangan dan analisa intensif dilakukan setelah berakhirnya pengumpulan data. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan dengan segala metode yang telah diuraikan diatas.

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah reduksi data. Reduksi data merupakan salah satu bentuk penyensoran data yang dilakukan dengan membuang data-data yang telah terkumpul namun tidak diperlukan, dengan salah satu tujuannya adalah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan sehingga dapat ditarik sebuah garis kesimpulan final dan diverifikasi.

²⁶ Tatang Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*. Rajawali Press. Jakarta. 1996

Selanjutnya adalah menafsirkan, menilai, atau menganalisa data. Dalam tahap ini dilakukan analisa data dengan berpijak pada kerangka teori. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan. Tahap terakhir dalam analisa data adalah mengadakan pemeriksaan untuk mengetahui keabsahan data.²⁷

G.6. Validitas Data

Validitas data ditujukan sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi dilapangan. Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, dimana untuk mendapatkan data tidak hanya diambil dari satu sumber saja, namun dari beberapa sumber sekaligus.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan, atau bisa juga sebagai pembanding data yang telah diperoleh sebelumnya.

Triangulasi ada 4 macam, yaitu :

1. Triangulasi data/sumber

Data yang sama akan lebih mantab apabila digali dari berbagai sumber lain.

2. Triangulasi Peneliti

Hasil penelitian berupa data sebagian atau seluruhnya bias diuji validitasnya dengan beberapa peneliti.

3. Triangulasi metodologis.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung, 1991

Mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda.

4. Triangulasi Teori

Peneliti menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas masalah yang dikaji.²⁸

Teknik validitas data yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi dengan sumber lain berarti membandingkan atau mengecek balik derajat kepercayaan terhadap suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, menggunakan metode kualitatif. Hasil tersebut akan dapat dicapai dengan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Bab I

²⁸ Hb. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta 2002 : 36

²⁹ Ibid, hal 178

Berisi tentang rancangan penelitian seperti : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka teori, definisi konsep, definisi operasional, validitas data dan metodologi penelitian

Bab II

Berisi tentang profil kecamatan Serengan, serta profil dari Partai Amanat Nasional baik di tingkat pusat maupun di tingkat DPC Serengan, tinjauan umum hubungan partai politik dengan Organisasi Kemasyarakatan, tinjauan singkat Organisasi Kemasyarakatan yang berada di wilayah kecamatan Serengan,

Bab III

Dalam bab ini akan disajikan realitas proses komunikasi politik yang dilakukan Partai Amanat Nasional dengan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan, serta analisa faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun penghambatnya

Bab IV

Berisi tentang kesimpulan penelitian dan juga saran.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI

A. Lokasi Penelitian

Kota Surakarta dengan luas wilayah 44,04 memiliki jumlah penduduk sebanyak 490.214 jiwa yang tersebar ke 5 wilayah kecamatan. Kepadatan rata-rata adalah 212.594 jiwa/km . Wilayah dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Serengan dengan kepadatan 19.394 jiwa/km . Sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah adalah kecamatan Jebres yaitu 10.127 jiwa/km.

Secara geografis wilayah Kota Surakarta berada antara 110°45'15"-110°45'35" BT dan 7°36'00"- 7°56'00"LS dengan luas wilayah 44,04 Km² dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali

Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo

Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Secara umum kota Surakarta merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan kali/sungai-sungai Pepe, Jenes dengan Bengawan Solo, yang mempunyai ketinggian ±92 dari permukaan air laut.

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan seluas keseluruhan 44,04 km dengan jumlah penduduk sesuai sensus tahun 2000 sejumlah 490.214 jiwa. Kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling besar yaitu Kecamatan Banjarsari (14,81 km) sedangkan kecamatan yang mempunyai luas paling kecil yaitu Kecamatan Serengan. Wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pasar Kliwon (915.418 jiwa/km²) dan terendah terdapat pada Kecamatan Laweyan (10.127 jiwa/km²).

JUMLAH PENDUDUK KOTA SURAKARTA TAHUN 2002

NO	KECAMATAN	LUAS (Km ²)	PENDUDUK	
			JUMLAH	KEPADATAN
1	Laweyan	8,64	107.622	12.459
2	Serengan	3,19	61.945	19.394
3	Pasar Kliwon	4,82	85.593	17.776
4	Jebres	12,58	136.762	10.870
5	Banjarsari	14,81	162.708	10.986
	TOTAL	44,04	554.630	12.594

Sumber : Badan Pusat Statistik Surakarta

A.1. Kecamatan Serengan

Serengan adalah sebuah kecamatan yang terletak dibagian sebelah selatan kota Surakarta. Kecamatan ini merupakan wilayah kecamatan terkecil dari kota Surakarta dengan luas wilayah 3,19 kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk sebesar 19.394 jiwa, Kecamatan Serengan merupakan kecamatan yang terpadat di Surakarta, mengingat luas wilayah kecamatan ini adalah yang terkecil di antara kecamatan-kecamatan yang lain. Wilayah kecamatan serengan meliputi 7 kelurahan, yaitu; Joyotakan, Danukusuman, Serengan, Kemlayan, Tipes, Jayengan, dan Kratonan. Kecamatan Serengan berbatasan langsung dengan Kecamatan Laweyan disebelah barat, Kecamatan Pasar Kliwon di sebelah Timur, Kecamatan Banjarsari disebelah utara, dan di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukoharjo. Mayoritas penduduk kecamatan Serengan

beragama Islam, dan berprofesi sebagai buruh Industri. Tamatan SD menduduki peringkat pertama dalam data penduduk menurut tingkat pendidikan. Sebagian besar warga Kecamatan Serengan berprofesi sebagai buruh bangunan. (Data Laporan Monografi Dinamis Kecamatan Serengan triwulan ke IV tahun 2008)

SEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN SERENGAN

Kelurahan	Luas Wilayah Km²	Jumlah Penduduk	Sex Ratio	Tingkat Kepadatan
Joyotakan	0,459	8.033	99	17.501
Danukusuman	0,508	11.943	94	23.510
Serengan	0,640	12.049	98	18.827
Tipes	0,640	12.779	98	19.967
Kratonan	0,324	6.346	96	19.586
Jayengan	0,293	5.840	97	19.932
Kemlayan	0,330	4.955	89	15.015

Sumber : Badan Pusat Statistik Surakarta

B. Partai Amanat Nasional

Setelah orde baru tumbang pada Mei 1998, seperti merupakan sebuah sirene kebebasan berpolitik yang dibunyikan keras-keras. Berbondong-bondong parpol-parpol baru bermunculan. Kekuatan-kekuatan politik yang merasa terbungkam/dibungkam semasa orde baru berkuasa mulai bermunculan ke permukaan. Sosok-sosok yang merasa memiliki kepentingan politik dan kekuasaan berlomba-lomba mendirikan partai politik sebagai kendaraannya untuk

meraih kekuasaan. Hal seperti ini merupakan fenomena yang sangat menarik. Di satu sisi, dengan bermunculannya banyak partai menunjukkan kehidupan demokrasi politik Indonesia yang telah mulai kembali pada jalannya yang benar, namun disisi yang lain, disinyalir partai-partai yang banyak bermunculan tersebut hanyalah mengkomodifikasi syahwat kekuasaan dari sang pendiri, bukan murni untuk berjuang atas nama rakyat.

Partai Amanat Nasional resmi berdiri pada 23 Agustus 1998, atau dengan kata lain PAN berdiri setelah orde baru tumbang dan munculnya kebebasan berpolitik yang telah lama dibelenggu oleh pemerintahan semasa orde baru. Dalam keikutsertaannya pada Pemilu 1999, Partai Amanat Nasional muncul sebagai sebuah fenomena politik menarik. Sebagai partai baru, PAN telah berhasil mendapatkan hati rakyat dengan perolehan suara yang cukup baik dengan perolehan 7% suara. Persentase ini dalam Pemilu 2004 makin menurun menjadi 6,4% meski perolehan kursi DPR meningkat. PAN juga gagal mengantarkan Amien Rais menjadi presiden pada pilpres 2004.

Sejak awal berdiri PAN sudah menyatakan diri sebagai partai yang bersifat terbuka seperti yang tercantum dalam platformnya, namun tidak urung PAN dicap sebagai partainya orang Muhammadiyah. Hal tersebut tidak lain karena ketokohan Amien Rais sebagai pendiri PAN yang juga sebagai tokoh di organisasi Muhammadiyah.

B. 1. Sejarah Partai Amanat Nasional

Tanggal 5-7 Juli 1998, dilaksanakan Tanwir Muhammadiyah di Semarang yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta utusan dari tingkat Wilayah(provinsi). Dalam sidang komisi, mayoritas peserta menginginkan agar warga Muhammadiyah membangun partai yang baru. Namun dalam keputusan resmi dinyatakan, bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah berubah menjadi parpol, juga tidak akan membidani lahirnya sebuah parpol. Tetapi warga Muhammadiyah diberi keleluasaan untuk terlibat dalam parpol sesuai dengan minat dan potensinya.

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, mantan Ketua umum Muhammadiyah, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya. Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selibhnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai

jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

Pada Pemilu 2004, PAN mencalonkan pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo sebagai calon presiden untuk dipilih secara langsung. Pasangan ini meraih hampir 15% suara nasional. Kini menjelang Pemilu 2009 PAN telah berganti wajah menjadi partai yang mengusung pembaharuan partai dan mengangkat kaum muda sebagai pemimpin. Dibawah kepemimpinan Sutrisno Bachir sebagai ketua partai, dan dengan berasaskan "Akhlaq Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam" PAN telah menyusun strategi kembali untuk menggalang dukungan dengan berbagai golongan dan unsur Muhammadiyah.

B.2. Logo Partai Amanat Nasional



Partai Amanat Nasional memiliki logo berupa matahari yang bersinar cerah dengan warna putih berlatar belakang bidang segi empat dengan warna biru serta tulisan PAN dibawahnya.

B.2.1. Filosofi Logo

Matahari putih yang bersinar cerah dilatarbelakangi segi empat warna biru dengan tulisan PAN dibawahnya, merupakan simbolisasi bahwa Partai Amanat Nasional membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

B.2.2. Makna Logo

Simbol Matahari yang bersinar terang; Matahari merupakan sumber cahaya, sumber kehidupan. Warna putih adalah ekspresi dari kebenaran, keadilan dan semangat baru.

B.3. Partai Amanat Nasional DPC Serengan Surakarta

Partai Amanat Nasional DPC Serengan Surakarta mengambil sekretariat di Jl. Wisanggeni II Rt 02 Rw 08 Kalurahan Serengan, Surakarta. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional Kecamatan Kota Surakarta periode 2005-2010 disahkan melalui Surat Keputusan Nomor: PAN/11.29/A/Kpts/K-WS/003/IX/2007.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Bab VI Pasal 10 poin 5 bahwa Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Majelis Pertimbangan Partai cabang dan seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan Cabang.

Tabel berikut merupakan susunan Majelis Penasehat Partai Cabang pada PAN DPC Serengan Kota Surakarta:

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	H. Widodo Muchtar, SE
2	Sekretaris	H.Fauzan Adzirna SE.MM
3	Anggota	Drs. Sukarno HS, SH Drs. Ahmad Suroto Syamsuri Boyke Abu Amar Jamil Hadi Sasmito

Berikut susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional

Kecamatan Serengan Kota Surakarta:

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Marjanto
2	Wakil Ketua :	
	1. Bapilu	Sidiq Mukhlis Hamidi
	2. Perkaderan, Pengemb.Organisasi Litbang	Eriadi Dodi P, SE
	3. Sistem Infokom, Hub. Antar Lembaga	Narjito
	4. Kepemudaan & Olah Raga, Pengemb. Seni Budaya	Muhammad Syamsuri
	5. Kesehatan dan Pendidikan	Amar Makruf
	6. Ekonomi, Kop, Jaringan Usaha & Wirausaha,Kesra	Munawar Cholil
	7. Pemberdayaan Perempuan	Endang Werdiningsih

3	Sekretaris	Suharno
4	Wakil Sekretaris: 1. Bapilu 2. Perkaderan, Pengemb.Organisasi Litbang 3. Sistem Infokom, Hub. Antar Lembaga 4. Kepemudaan & Olah Raga, Pengemb. Seni Budaya 5. Kesehatan dan Pendidikan 6. Ekonomi, Kop, Jaringan Usaha & Wirausaha,Kesra 7. Pemberdayaan Perempuan	Muhammad Najib Suharno M. Chafid Pranoto Isnandar Muslih Yani Effendi Dewi Rochyani
5	Bendahara	Wiraji Atmoko
6	Wakil Bendahara Wakil Bendahara	Mahmud Tohyan Eriawan Doni K, SE

Disamping pengurus harian, dalam struktur organisasi PAN DPC Serengan juga terdapat Badan-badan, dimana dalam setiap Badan memiliki ketua dan sekretaris yang membawahi beberapa departemen yang juga memiliki kepala dan anggota masing-masing. Untuk selengkapnya mengenai Badan-badan

dalam struktur organisasi PAN DPC Serengan ini akan terdapat dalam lampiran.

C. Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan

Menurut data yang ada di KESBANGLINMAS kota Surakarta, ada beberapa nama organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Serengan. Peneliti mengambil sampel organisasi kemasyarakatan dengan mengambil data yang ada di KESBANGLINMAS dengan asumsi bahwa organisasi kemasyarakatan yang terdaftar berarti memang benar-benar organisasi yang dikelola secara serius, memiliki visi misi yang jelas, serta mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

Berikut daftar organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah kecamatan Serengan:

1. Paguyuban Jawi Jangkep Condhong Raos

Ketua : Subarjo

Alamat : Joyotakan RW IV Surakarta

Bidang : Kesenian

2. Paguyuban Suko Manunggal

Ketua : Sugino Hadi Suroyo

Alamat : Jl. Kahayangan I RT I/VI Joyotakan Surakarta

Bidang : Kemasyarakatan

3. Forum Penegak Kadilan dan Kebenaran (FPKK)

Ketua : Ismu Wardoyo

Alamat : Jl. Pattimura No:165 Dawung T RT 03/IX Serengan Surakarta

Bidang : Kemasyarakatan

**4. Center For Urban Research and Community Management
(CIRCUM)**

Ketua : Adi Himawan, S.Sos

Alamat : Kartopuran no:5 RT 03/06 Jayengan, Serengan, Surakarta

Bidang : Kemasyarakatan

5. Lembaga Swadaya Masyarakat

Ketua : Andreas Hendra

Alamat : Jl. Pangsrn Wijil No.3 RT 03/12 Tipes Surakarta

Bidang : Kemasyarakatan

**D. Tinjauan umum Hubungan Partai politik dan Organisasi
Kemasyarakatan di Indonesia**

Semenjak Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, kehidupan politik di Indonesia secara perlahan bergeser dari sistem politik tertutup menjadi sistem politik terbuka. Pola komunikasi politik yang terjadi tidak melulu linear melainkan sudah mulai menerapkan pola komunikasi banyak arah. Pada suatu saat menerapkan pola komunikasi top down, pada saat yang lain bottom up, dan juga tidak mengesampingkan paradigma horisontal. Pendekatan mana yang digunakan tergantung siapa yang menyampaikan pesan politik dan kepada siapa pesan itu

ditujukan. Muatan pesan juga menentukan paradigma komunikasi mana yang digunakan. Penerapan pendekatan itu tidak lagi menganggap penerima pesan politik sebagai sosok pasif yang menerima begitu saja pesan politik yang diterimanya. Pada era reformasi dengan sistem politik terbuka, penerima pesan politik dianggap aktif dan selektif.

Dalam sistem politik yang seperti ini, peran lembaga perwakilan rakyat sangat krusial. Di tangan merekalah terletak kunci keberhasilan sistem politik seperti ini. Para wakil rakyat dituntut untuk aktif dan reaksioner terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Para wakil rakyat yang merupakan orang-orang pilihan dari partai politiknya tersebut dituntut untuk benar-benar bertindak sebagai jembatan penghubung antara suara rakyat yang mereka wakili dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di republik ini. Apapun yang mereka perjuangkan dan suarakan haruslah tidak boleh menyimpang dari apa yang di kehendaki rakyat, dalam kata lain mereka para wakil rakyat tersebut dituntut untuk benar-benar berpihak pada rakyat.

Hal yang paling menarik pasca lengsernya rezim Soeharto adalah reformasi di bidang kepartaian, dimana selama Orde Baru partai dibatasi hanya tiga partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pasca Orde Baru (era reformasi), partai peserta Pemilu diberi kebebasan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hampir 140 partai lebih terdaftar setelah tujuh bulan Presiden Habibie berkuasa, dan kemudian hanya 48 partai yang dapat ikut dalam Pemilu Juni 1999. Dari ke 48 partai yang ikut dalam Pemilu, hanya 21

partai saja yang mendapatkan kursi di Parlemen (DPR). Dari 21 partai yang mendapatkan kursi di Parlemen, hanya ada enam partai saja yang mendapatkan suara minimal 3% yaitu partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar 33,67 %, Partai Golkar sebesar 21,62%, Partai Kebangkitan bangsa (PKB) sebesar 11,14%, partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 10,72%, Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 7,12%, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 3,84% . Sementara ke 42 partai tidak dapat memenuhi batas batas minimal perolehan suara sehingga mereka harus meleburkan diri dengan partai lain atau membuat partai baru.³⁰

Namun demikian, munculnya beragam partai baru belum diikuti dengan kinerja partai politik yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak berjalannya fungsi organisasi, dimana partai politik hanya dikendalikan oleh sekelompok elit parpol baik yang ada di pusat maupun di daerah. Kondisi itu ditenggarai telah mengakibatkan terjadinya pergeseran politik dalam Pemilu 2004 dimana telah terjadi kekecewaan terhadap kinerja dari partai-partai tersebut. Kondisi ini berujung pada menurunnya perolehan suara beberapa partai-partai besar yang lulus electoral threshold. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dalam Pemilu 1999 memperoleh sekitar 33,67 %, dalam Pemilu 2004 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi 19,58 %. Yang juga diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan dari 10,72% menjadi 8,32% dan Partai Amanat Nasional dari 7,12% menjadi 6,47% (data KPU).

Namun demikian secara umum partai-partai yang berbasis nasionalis

³⁰ *Perolehan Suara Pemilu 1999*, <http://KPU.go.id>

tetap mendominasi dalam pemilihan umum baik pada Pemilu 1999 maupun 2004. Perolehan suara partai-partai tersebut sangat ditentukan oleh tiga faktor baru yang muncul dalam Pemilu 2004: Civic disengagement, swing voters, dan split voting. Civic disengagement adalah kemampuan rakyat mengambil jarak dengan proses politik, sehingga mampu mereorientasi konsep dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat. Swing voter, adalah suara pindah dari satu ke lain partai. Split voting adalah pola memberi suara yang tidak hanya kesatu parpol untuk berbagai kesempatan memilih yang tersedia.³¹ Dalam Pemilu 2004, walaupun hasilnya tidak begitu jauh berbeda dengan Pemilu 1999 dimana partai besar tetap dominan, namun ada fenomena yang menarik dengan munculnya partai politik baru yang mendapat simpati sehingga mendapatkan suara yang cukup besar seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan di sisi lain ada partai yang mengalami peningkatan pemilih seiring dengan berkurangnya pemilih yang lain.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2004 telah terjadi pergeseran pemilih walaupun tidak terlalu signifikan. Seiring dengan munculnya Partai Demokrat, banyak partai-partai besar papan atas dan menengah mengalami kemunduran dalam perolehan suara pada Pemilu 2004.

Pemilu 2004 tergolong unik, karena diikuti oleh banyak partai politik yang ikut meramaikan kancah perpolitikan Indonesia. Ada 5 partai besar yang ada dalam Pemilu, diantaranya: PDI-Perjuangan yang di Ketuai oleh Megawati Soekarno Putri, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diketuai oleh KH.

³¹ Asep Nurjaman, *Peran Parpol dalam Demokrasi dan Pemenuhan Kebutuhan Rakyat*, ARSIP <http://forum-politisi.org>

Abdurrahman Wahid, Partai Amanat Nasional (PAN) diketuai oleh Prof. Dr. Amien Rais, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Setiap partai besar merupakan pusat dari kumpulan organisasi yang saling berkaitan satu sama lain.

Sebagaimana kita sadari bersama bahwa instrumen kelembagaan yang paling strategis dalam mengembangkan pemberdayaan politik masyarakat menuju kedewasaan politik adalah partai politik, hal ini bisa dipahami karena partai politik merupakan jembatan langsung antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk mengembangkan sistem kepartaian yang mampu menghasilkan partai politik yang profesional yang dapat menjalankan peran dan fungsinya secara baik dan bertanggung jawab, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada partai. Adanya partai politik yang baik diharapkan dapat berpengaruh terhadap kokohnya integrasi nasional, tingginya partisipasi, besarnya legitimasi, maupun efektifnya penyelesaian konflik. Namun patut disayangkan, kondisi riil kepartaian yang sekarang tidak dibangun demi kemaslahatan dan pembangunan bangsa kedepan, sebab partai-partai yang ada hanya berpikir bagaimana bisa meraih suara sebanyak-banyaknya dan bisa berkuasa selamanya. Partai politik tidak lagi mengindahkan aspirasi dari masyarakat namun sekedar memanfaatkan suara dari masyarakat tersebut untuk memuluskan jalan menuju kekuasaan.

Perjalanan kehidupan partai politik di Indonesia memberi gambaran bahwa masalah yang perlu dikaitkan dengan unsur-unsur organisasi yaitu bagaimana

hubungan antara partai dengan masyarakat pendukung partai, peranan ideologi di dalam kehidupan partai serta peranannya bagi kelancaran perputaran mesin partai. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia. Mereka harus mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Komunikasi politik mutlak harus dilakukan oleh setiap partai politik untuk menyalurkan pemikiran, gagasan, dan ide politik dari partai terhadap para konstituennya.

Menjelang PEMILU 2009 kehidupan politik di Indonesia semakin bergairah. Media mulai banyak menyoroti kehidupan Partai-Partai politik yang mulai bergeliat menunjukkan aktifitasnya kembali. Kemunculan Partai-Partai politik baru, konflik internal Partai, sampai koalisi beberapa Partai untuk mengusung salah satu calon kepala daerah dalam PILKADA mulai rutin menghiasi berita di berbagai media nasional baik cetak maupun elektronik. Tentu saja dalam hiruk pikuk politik ini tidak dapat dikesampingkan peran konstituen Partai, baik itu individual maupun yang berbentuk organisasi kemasyarakatan. Penggalangan dan pengerahan massa adalah bagian yang sangat essensial dalam tahapan strategi pemenangan Pemilu. Pemetaan dan identifikasi basis massa secara menyeluruh akan sangat menentukan langkah strategis Partai dalam Pemilu mendatang.

Cara masyarakat menentukan pilihannya tergantung pada karakteristik masyarakat yang bersangkutan. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan logika dan rasionalitas dalam menimbang kontestan. Kemampuan kontestan dalam memecahkan persoalan dalam masyarakat merupakan titik

perhatian kelompok jenis ini. Di lain pihak, kedekatan ideologis juga menjadi kekuatan untuk menarik pemilih ke dalam bilik suara dan mencoblos kontestan yang berideologi sama. Pemilih jenis ini tidak begitu mempedulikan program kerja apa yang ditawarkan oleh partai politik bersangkutan, asal ideologi partai sama dengan ideologi pemilih, sudah cukup alasan bagi pemilih untuk memberikan suaranya bagi kontestan atau partai politik tersebut.

Konstituen, non-partisan dan pendukung pesaing membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang diwakili dan memiliki kedekatan dengan suatu partai politik. Kelompok masyarakat ini merupakan basis pendukung utama kontestan atau partai politik. Konstituen memiliki loyalitas yang paling tinggi diantara jenis-jenis pemilih yang lain. Sedangkan non-partisan adalah massa mengambang yang masih belum memutuskan partai politik mana yang akan memperoleh suara mereka. Seringkali pemilih jenis ini menjatuhkan pilihannya pada saat-saat terakhir menjelang pemilihan, atau bahkan malah sama sekali tidak memberikan suaranya pada satu partaipun. Hal ini dimungkinkan karena mereka melihat tidak ada satu partaipun yang mampu mewakili keinginan mereka. Jenis pemilih yang terakhir adalah pendukung pesaing.

Suatu partai politik atau kontestan individu tidak boleh mengesampingkan pendukung partai atau kontestan lain. Memberikan informasi pada pendukung partai politik atau kontestan lain perlu dilakukan untuk menjaga atmosfer persaingan politik agar tetap dingin dan tidak menimbulkan perpecahan. Selain itu, kesan positif perlu dimunculkan kepada para pendukung pesaing.

Kemudian muncul sebuah istilah *swing voters*, mereka adalah para pemilih yang berganti haluan atau memilih partai yang lain dari yang dulu menjadi pilihannya. Pemilih jenis ini biasanya merupakan pemilih yang memiliki tingkat pendidikan politik yang sudah baik. Mereka menentukan pilihan berdasarkan pengamatannya termasuk mengenai apa yang ditawarkan Partai dan bagaimana kiprah partai politik tersebut dalam tahun-tahun belakangan. Jelas sekali bahwa mereka bukanlah pemilih tradisional yang kadang loyalitasnya kepada sebuah partai politik terdengar agak konyol dan membabi buta.

Sudah umum terjadi di Indonesia bahwa Partai “membeli” suara dari konstituen. Praktek jual beli suara ini dapat dilakukan secara terselubung maupun secara terbuka. Sasaran dari praktek jual beli suara Partai politik ini biasanya menysasar pada kalangan penduduk yang tingkat pendidikan maupun tingkat kesejahteraannya dibawah rata-rata. Dengan membagikan sembako, membagikan kaos, membangun masjid, dan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, Partai mengharapkan suara dapat terjaring.

Menjelang Pemilu legislatif, praktek politik uang ini juga beragam bentuknya. Ada caleg dari sebuah partai politik yang dalam kampanyenya mengadakan kuis(yang tentu saja sangat mudah) dan membagi-bagikan hadiah atas nama kuis tersebut, namun oleh KPK hal ini disinyalir sebagai sebuah praktik politik uang. Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk menutupi praktek politik uang ini. Namun masyarakat kita sudah terlanjur memaklumi, bahkan sebagian ada yang malah mengharapkan adanya praktek politik uang ini. Pendidikan dan

sosialisasi politik sangat diperlukan agar masyarakat Indonesia bisa diajak untuk melaksanakan demokrasi dengan baik dan benar

Partai-partai politik berkampanye, berkegiatan, dan bersosialisasi dengan masyarakat dalam kaitannya untuk menjaring konstituen, telah sekaligus memberikan sosialisasi politik pada masyarakat. Media massa juga berperan besar dalam hal sosialisasi politik ini. Sosialisasi politik adalah tentang bagaimana kita datang untuk belajar tentang politik, bagaimana kita mendapatkan nilai dan sikap kita tentang lembaga politik, dan bagaimana kita akhirnya berperilaku politik.

Budaya politik yang berkembang pada suatu masyarakat pada hakikatnya merupakan produk dari proses sosialisasi politik yang berlangsung secara kontinyu dan dalam waktu yang cukup lama. Melalui sosialisasi politik, masyarakat dapat belajar tentang politik sehingga mampu menentukan sikap terhadap lembaga-lembaga politik tertentu dan bahkan mewujudkannya dalam bentuk perilaku politik. Perilaku politik inilah yang akan diteruskan pada generasi-generasi selanjutnya yang kemudian akan membentuk sebuah budaya politik.

Upaya lain yang dilakukan Partai dalam menjaring pemilih adalah dengan menaungi sejumlah organisasi kemasyarakatan. Cara ini dinilai praktis karena dengan menaungi dua atau tiga organisasi kemasyarakatan maka otomatis akan mampu untuk menjaring konstituen dalam jumlah yang besar sekaligus. Organisasi kemasyarakatan biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, sehingga dengan begitu akan mudah untuk mengarahkan anggota-anggota yang berada dalam organisasi tersebut.

Ada semacam hubungan yang saling menguntungkan antara Partai politik dengan Organisasi Kemasyarakatan. Partai politik akan diuntungkan karena dengan menaungi sebuah organisasi kemasyarakatan, maka setidaknya akan memperoleh sejumlah suara yang berasal dari anggota organisasi kemasyarakatan tersebut, meskipun tidak ada jaminan seratus persen anggota organisasi kemasyarakatan itu akan memberikan suara untuk Partai politik yang bersangkutan. Sedangkan bagi organisasi kemasyarakatan sendiri akan diuntungkan dari dukungan materiil maupun moril yang akan diperoleh dari Partai politik yang menaunginya. Dalam sistem politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga non pemerintah berperan untuk mengartikulasikan kepentingan politik masyarakat yang kemudian akan menjadi sebuah masukan/input dalam sebuah penentuan kebijakan publik/public policy. Sejauh mana organisasi kemasyarakatan dapat bersikap ketika mereka berada dalam suatu naungan partai politik tertentu? Apakah organisasi kemasyarakatan tersebut hanya semata menjadi sapi perahan bagi partai politik yang menaunginya, ataukah masih dapat bertahan dengan visi dan misi utama mereka sendiri? Hal ini yang menarik untuk disimak.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional - Organisasi Kemasyarakatan di

Kecamatan Serengan Surakarta

A. Pengantar

Pada dasarnya hubungan komunikasi politik antara sebuah partai politik dengan masyarakat secara umum adalah sangat sederhana. Pola yang terbentuk di sini semuanya sama yaitu berdasarkan pemahaman bersama bahwa partai politik membutuhkan masyarakat sebagai konstituen partai,

untuk itu partai politik mau tidak mau harus melakukan sebuah pendekatan politik dengan masyarakat bagaimanapun dan apapun bentuknya.

Dalam penelitian ini digunakan definisi komunikasi politik sebagai suatu proses penginformasian timbal balik, yaitu penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator, berupa pernyataan dan tindakan, kepada komunikan, dan penyampaian informasi tersebut menimbulkan efek berupa feedback dari komunikan.

Sedangkan masyarakat awam memandang komunikasi politik hanyalah merupakan kepentingan partai saja, atau dalam kata lain memandang komunikasi politik sebagai proses komunikasi satu arah, tanpa harus ada imbal balik/feedback dari komunikan.³²

Komunikasi politik mutlak dilakukan oleh Partai politik dengan masyarakat/lembaga/organisasi untuk memancing adanya partisipasi politik. Partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.³³ Di sisi lain, partisipasi politik pun diarahkan untuk memperkuat sistem politik yang ada. Dalam hal ini partisipasi politik dipandang sebagai bentuk legitimasi dari sistem politik yang bersangkutan. Atau dengan kata lain partisipasi politik menjadi salah satu indikator signifikan atas dukungan rakyat baik terhadap pemimpinnya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpinnya, maupun bagi sistem politik yang diterapkannya.

³² Hasil wawancara dengan aktivis organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Serengan

³³ Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan partai politik : sebuah bunga rampai*, Gramedia, Jakarta 1981 hal 2

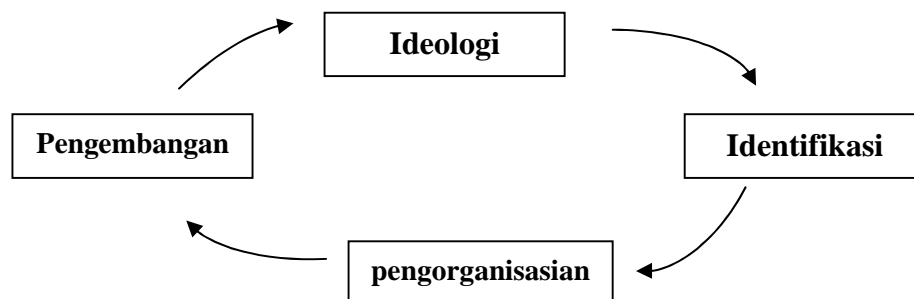
Dalam kaitannya dengan pendekatan terhadap masyarakat untuk memancing partisipasi politik tersebut, politisi dari partai yang bersangkutan harus pandai-pandai mencari tahu apa yang sedang dibutuhkan masyarakat saat itu dan isu apa yang sedang berkembang di dalam masyarakat tersebut, untuk kemudian masukan-masukan tersebut dikelola dalam sebuah manajemen isu yang pada akhirnya nanti menghasilkan sebuah formula solusi yang akan dilemparkan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya sebuah solusi dari partai, maka masyarakat akan bersimpati yang pada akhirnya akan menjadi konstituen partai yang bersangkutan.

Meski kelihatan cukup sederhana, namun pada kenyataannya tidaklah semudah itu. Banyak faktor, baik eksternal maupun internal, yang akan menjadi penghambat proses pendekatan partai politik terhadap calon konstituennya tersebut. Sebelum melakukan hubungan komunikasi politik dengan masyarakat, sebelumnya partai politik harus mengidentifikasi masyarakat yang paling tidak memiliki ideologi yang hampir sama dengan yang dimiliki partai. Dengan tingkat kesamaan ideologi yang dimiliki, maka akan memudahkan partai politik untuk melakukan pendekatan dan dapat meraih simpati dengan mudah.

Akan lebih memudahkan lagi apabila sekelompok masyarakat yang berideologi sama itu bernaung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan. Partai politik tinggal mentransfer ideologi, program, dan visi misi partai ke dalam organisasi tersebut maka peluang untuk menjaring konstituen dalam jumlah yang banyak sekaligus akan lebih terbuka. Jadi disini partai politik

menempatkan organisasi kemasyarakatan tersebut sebagai mediator kepada masyarakat luas, terutama yang tergabung dalam organisasi tersebut. Ideologi dan nilai-nilai merupakan pondasi hubungan partai politik dengan konstituen.

Ada tiga pilar utama yang berperan dalam hubungan Partai politik dengan konstituen, yaitu sumber daya manusia, prosedur dan mekanisme internal partai, dan sumber daya finansial. Partai harus membangun ideologi sebagai landasan pemikiran dan program partai. Kalau ada ideologi dan nilai-nilai yang jelas, partai dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kurang lebih satu kesamaan dengan ideologi yang mau dikembangkan partai tersebut, baru setelah itu dilakukan pengorganisasian. Kemudian pengembangan program dapat dijalankan. Ideologi dan nilai-nilai dihadapkan pada semua masalah untuk mengembangkan tawaran solusi atas masalah-masalah, baik masalah ekonomi, sosial, antar agama, dan lain-lain. Ini yang akan membuat ideologi secara terus menerus teraplikasikan atau hidup. Ini menjadi siklus, sehingga ini menjadi gerak spiral ke atas seperti digambarkan pada diagram dibawah ini.³⁴



³⁴ ARSIP, *Pola Pengelolaan Hubungan Partai politik dengan Konstituen*, <http://forum-politisi.org>

Pengelolaan hubungan dengan masyarakat juga penting bagi keberlangsungan partai politik sebagai organisasi sosial. Seluruh organisasi berusaha untuk menstabilkan dan mengontrol lingkungannya, yang mana lingkungan yang sangat sentral bagi partai politik adalah konstituen. Hubungan dan komunikasi dengan masyarakat yang konsisten dan dua arah dapat merupakan stabilisator bagi partai, sebab pemilih merasa lebih akrab dan terikat pada partai dan akan memberikan kontribusi kepadanya.

Maka dari itu, partai politik harus berusaha membangun hubungan dengan konstituen yang stabil dan berjangka panjang. Agar hubungan dengan konstituen dapat didirikan dan dikelola dengan baik partai harus mengembangkan pemahaman ideologi dan nilai-nilai dasar partai dan membangun infrastruktur partai terlebih dahulu.

Pemahaman yang terbentuk pada masyarakat Indonesia selama ini adalah bahwa para politisi hanyalah berjuang demi partai dan dirinya saja, masyarakat sudah terlanjur pesimis bahwa para politisi maupun partai akan benar-benar memperjuangkan suara mereka sampai di tingkat atas, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan saudara Abdul salah satu penggiat organisasi kemasyarakatan:

Politik itu kan tujuannya kekuasaan mas, dan yang menikmati kekuasaan hanyalah orang-orang yang bersangkutan(para politisi) saja, kalau dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat masih belum bisa lah .³⁵

³⁵ Wawancara dengan Abdul aktivis organisasi kemasyarakatan, 12 September 2009

Bahkan lebih parah lagi pola hubungan partai politik dengan masyarakat sudah terjebak dalam pola transaksional atau sekedar jual beli suara menjelang Pemilu saja. Partai politik dipandang hanya menggunakan konstituen untuk jangka pendek, yaitu sebagai sumber kekuatan untuk meraih posisi di dewan.

Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang terlanjur berpikiran seperti itu, karena pada kenyataannya partai politik hanya intens melakukan komunikasi politik dengan masyarakat menjelang pemilihan umum saja. Tidak adanya hubungan yang berkesinambungan antara partai politik dengan masyarakat/konstituen selepas Pemilu membuat masyarakat memiliki pandangan sinis terhadap partai politik. Selain itu masih terbacanya pola umum hubungan partai politik dengan masyarakat yang hanya berjalan searah saja memperparah pandangan masyarakat terhadap politisi maupun partai politik.

Partai politik selama ini hanya menjejali masyarakat dengan ideologi partai, program kerja partai, serta kepentingan partai saja kepada masyarakat tanpa memperhatikan input dari masyarakat. Belum ada partai politik yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk membentuk program kerja partai. Jadi pada intinya, sukses atau tidaknya partai politik dalam menuai konstituen bergantung dari kemampuan partai untuk merespon kemauan konstituennya tersebut. Partisipasi politik aktif masyarakat terhadap partai politik akan memberikan nilai tambah bagi partai tersebut di mata masyarakat,

jadi disini Partai politik menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai alat, namun diposisikan sebagai partner politik.

Sangat sulit pada jaman sekarang ini untuk mengharapkan partisipasi politik aktif dari masyarakat, era kapitalistik yang sudah ikut-ikutan merambah dunia politik membuat partai yang besar dengan sumber dana yang besar pula yang bisa bertahan dan mampu mendulang massa.

Saat ini kita hidup di jaman kapitalis, siapa yang memiliki banyak uang dialah yang berkuasa, hal itu juga berlangsung dalam politik mas, partai politik dan politisi yang memiliki sumber dana yang besar lah yang akan mampu bertahan.³⁶

Hal ini disebabkan masyarakat sendiri sudah memposisikan dirinya sebagai pemilih bayaran, dalam artian partai mana yang memberikan uang yang paling banyak maka itulah yang mereka pilih. Mengandalkan pemilih tradisional yang loyal saja tidak akan cukup untuk mampu bersaing dalam perolehan suara. Hal ini diperparah dengan kutu loncat para elit parpol baik tingkat pusat maupun daerah yang berpindah-pindah partai. Tentu saja kepindahan sosok tersebut diikuti oleh massanya sendiri.

Organisasi Kemasyarakatan sebagai sebuah organisasi yang memiliki visi dan misi serta AD/ART sendiri tentu saja tidak bisa serta merta mengikuti kemauan dari partai politik yang berkeinginan untuk merekrut mereka sebagai mitra dalam politik. Hal ini patut disadari sepenuhnya karena tidak semua

³⁶ Wawancara dengan Marjanto, ketua DPC PAN Serengan, 5 Oktober 2009

organisasi kemasyarakatan bergerak dalam bidang politik, bahkan mungkin malah bergerak dalam bidang yang sama sekali jauh dari urusan perpolitikan seperti bidang seni dan sosial misalnya. Harus adanya hal yang saling menguntungkan antara organisasi kemasyarakatan dan partai politik merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan agar hubungan antara Partai politik dan Organisasi Kemasyarakatan dapat berjalan dengan mulus dan lancar.

B. Gambaran Umum Hubungan Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional Dengan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan

Partai politik mewakili masyarakat atau, lebih persisnya, kepentingan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Partai politik mengumpulkan dan mengartikulasikan kepentingan tersebut dan mengintegrasikan ke dalam programnya. Sudah pasti program partai dipengaruhi oleh organisasi masyarakat sipil, seperti asosiasi bisnis, serikat buruh, organisasi agama, atau LSM. Sering terdapat ketegangan antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik yang dapat mempersulit kooperasi antara keduanya. Agar terbangun atau untuk memperkuat hubungan dengan organisasi masyarakat sipil, partai politik perlu mengenali komposisi sosial anggota dan pemilihnya sendiri, juga komposisi sosial masyarakat disekitarnya.

Definisi partai politik dalam penelitian ini meminjam dari pengertian **Haryanto**³⁷ yang menyatakan bahwa partai politik pada hakekatnya adalah

³⁷ Haryanto. *Partai Politik : Suatu Tinjauan Umum*. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 1984

suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang punya cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama; dimana organisasi ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan; yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai ke tujuan tersebut, partai politik harus mengoptimalkan fungsi-fungsi yang dimiliki seperti yang disebutkan oleh **Maurice Duverger**³⁸ yaitu; fungsi pendidikan politik, fungsi agregasi politik, fungsi seleksi politik, fungsi artikulasi kepentingan, fungsi pengendalian dan pengawasan politik, serta fungsi komunikasi politik.

Dalam masyarakat sendiri arti sebuah partai politik secara umum tidak lebih dari sekedar organisasi atau lembaga untuk meraih kekuasaan, mengenai fungsi-fungsi partai politik tidak banyak yang memahaminya. Bahkan dari fungsionaris partai sendiri tidak begitu memahami apa-apa saja yang menjadi fungsi dari partai politik.

Kondisi PAN sendiri relatif tidak jauh berbeda dengan kondisi umum partai politik di Indonesia. Munculnya konflik internal partai, seperti kabar perseteruan dan silang pendapat antara Sutrisno Bachir dengan pendiri PAN Amien Rais, oleh masyarakat disikapi sebagai salah satu bentuk ketidakdewasaan partai politik.

³⁸ Maurice Duverger, . *Political Parties*, 1967, Methuen, London. Dalam *Pengantar Ilmu Politik, wawasan Pemikiran dan Kegunaanya* Drs.T. May Rudy, S.H, MIR.,M.SC. PT. Refika Aditama 2003.

Bagaimana partai politik akan memikirkan kesejahteraan rakyat bila dalam tubuh partai itu sendiri penuh dengan konflik, sekarang logikanya kalau orang-orang dalam partai sendiri saling terlibat konflik maka mereka akan sibuk sendiri dan tujuan partai untuk menyajahterakan masyarakat akan dilupakan.³⁹

Hubungan komunikasi politik antara Partai Amanat Nasional(PAN) dengan organisasi kemasyarakatan mutlak dilakukan. Tidak melulu organisasi kemasyarakatan yang dijadikan sasaran untuk komunikasi politik PAN harus berafiliasi dengan PAN itu sendiri. Seperti yang sudah diketahui bahwa saat ini ada 4 Organisasi Otonom yang berafiliasi ke PAN yaitu : Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Sentra Pergerakan Pekerja Amanat Nasional (SP.PAN) dan Himpunan Profesi Angkutan Nasional (HIMPAN).⁴⁰

Diluar itu ada istilah Organisasi mitra, yaitu organisasi kemasyarakatan fungsional dan profesi yang dibentuk oleh masyarakat, bersedia menjalin hubungan kerjasama dengan partai dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui PAN. Meskipun organisasi mitra bukan subordinasi dari PAN, namun keberadaannya sangat potensial dijadikan sebagai mitra dalam melakukan akses dan jaringan ditengah masyarakat melalui pendekatan program partisipatif. Jadi sifat dari organisasi mitra ini adalah tetap independent, namun menyalurkan aspirasi politiknya lewat PAN.

³⁹ Wawancara dengan Abdul aktivivis organisasi kemasyarakatan Serengan, 12 September 2009

⁴⁰ Badan Otonom dan Antar Lembaga PAN, *Penggalangan Massa Perspektif Bakokal PAN*, <http://fokal.wordpress.com>

Posisi organisasi kemasyarakatan dalam penelitian ini masuk dalam kategori organisasi mitra, karena tidak ada satupun yang berafiliasi kepada PAN, namun membebaskan setiap anggotanya untuk mempunyai pandangan politik sendiri-sendiri dan menyalurkannya melalui partai politik manapun, seperti yang diungkapkan oleh Abdul, seorang penggiat ormas di Kecamatan Serengan:

Organisasi ini tidak mengikuti partai manapun, dan membebaskan setiap anggotanya untuk memilih partai mana yang sekiranya cocok dengan idealisme mereka.⁴¹

Ditubuh PAN sendiri ada sebuah lembaga atau divisi yang khusus menangani hubungan antar lembaga yang bernama BAKOKAL (Badan Otonom dan Hubungan Antar Lembaga). Dalam kaitannya dengan strategi penggalangan massa, Badan otonom dan Hubungan Antar lembaga adalah bagian dari kerangka infra struktur strategis partai yang menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan segmen dan sasaran program Partai itu sendiri. Secara substansial rumusan sasaran sebagaimana yang dipaparkan diatas berorientasi kepada 6 hal :⁴²

1. Membangun sistem

Gerakan awal yang harus dilakukan Partai adalah upaya membangun sistem kepartaian yang mapan sehingga dapat menata, mensinergikan,

⁴¹ Wawancara dengan Abdul aktivivis organisasi kemasyarakatan Serengan, 12 September 2009

⁴² <http://fokal.wordpress.com>

mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan seluruh potensi partai secara nasional.

2. Membangun kinerja

Terbangunnya sistem kerja yang baik akan sangat mendorong peningkatan mobilitas, produktifitas dan kinerja partai terhadap implementasi program. Selain itu peningkatan kinerja akan sangat berperan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja Partai.

3. Membangun Jaringan

Membangun jaringan partai seluas mungkin merupakan sasaran utama dalam sistem perencanaan strategis partai. Karena ketergantungan partai terhadap jaringan merupakan sebuah keniscayaan. Mustahil partai akan memenangkan Pemilu bilamana gagal membangun jaringan yang kuat diakar rumput (grass root).

4. Membangun Hubungan

Aspek positif dari proses sejarah yang telah dilakukan oleh Partai dalam interaksinya dengan masyarakat baik secara individu maupun institusi merupakan investasi politik yang harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin sebagai sebuah hubungan jangka panjang yang harmonis.

5. Membangun Komunikasi

Salah satu faktor yang sangat sensitif dalam proses hubungan sosial kemanusiaan adalah masalah komunikasi. Kesalahpahaman dan ketidak tahuan terhadap suatu hal sering menjadi sebab rusaknya hubungan komunikasi. Oleh karena itu partai secara sungguh-sungguh harus

mencairkan kebekuan hubungan komunikasi yang mungkin terjadi diantara sesama kader (internal) maupun terhadap berbagai pihak yang dianggap perlu (ekternal).

6. Membangun Opini/Imej/Citra

Sebagai partai politik, membangun citra tentu merupakan suatu keharusan jika ingin mendapat tempat dihati masyarakat. Jika tidak maka masyarakat akan dengan mudah melupakan PAN dan berpaling ke partai lain. Perang opini sampai sejauh ini masih menjadi senjata ampuh partai dalam merebut hati masyarakat. Partai yang lalai mengisi momentum politik akan tenggelam ditelan waktu, dan ini harus menjadi peringatan dalam perjalanan partai kita.

Selain itu, komunikasi politik oleh partai Amanat Nasional dapat dilakukan dengan mengoptimalkan badan otonom serta organisasi mitra yang dimiliki oleh Partai Amanat Nasional. Badan Otonom adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan karakteristik jenis kegiatan masing-masing dan menyatakan dirinya berafiliasi ke PAN.⁴³ Badan otonom terbentuk sebagai sebuah upaya sistematis dalam mengembangkan jaringan organisasi infra struktur partai atas dasar keswadayaan masyarakat untuk memperluas dukungan terhadap partai. Harus diakui bahwa keberadaan organisasi otonom partai saat ini masih belum secara keseluruhan mempunyai infrastruktur yang memadai.

Tugas utama Bakokal saat ini adalah untuk mengkondisikan keberadaan organisasi otonom agar dapat berjalan normal dan membangun

⁴³ BAB IX Psl.20. a.1 AD PAN

infra struktur organisasinya sampai ke akar rumput sehingga dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya serta meningkatkan kontribusinya terhadap partai. Organisasi mitra adalah organisasi kemasyarakatan fungsional dan profesi yang dibentuk oleh masyarakat, bersedia menjalin hubungan kerjasama dengan partai dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui PAN. Meskipun organisasi mitra bukan subordinasi dari PAN, namun keberadaannya sangat potensial dijadikan sebagai mitra dalam melakukan akses dan jaringan ditengah masyarakat melalui pendekatan program partisipatif. Saat ini di Bakokal tercatat sebanyak 40 organisasi mitra baik pusat maupun daerah.

Kota Surakarta memiliki komposisi masyarakat yang sangat majemuk. Kemajemukan kota Surakarta sangat kentara dalam hal multietnis masyarakat yang hidup di kota ini. Tingkat ekonomi serta pendidikan penduduk Surakarta pun beragam, pun begitu halnya dengan profesi yang digeluti. Keragaman yang ditopang dengan jumlah penduduk yang cukup besar membuat kota Surakarta menjadi sangat unik dalam perannya di dunia Politik. Banyak Partai politik yang berusaha menjadikan Kota Surakarta sebagai lumbung suara partai. Meski dalam beberapa Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih memegang suara terbanyak di kota ini, namun partai-partai yang lainpun tidak kalah agresif dalam mendulang suara di kota Surakarta ini. Komposisi sosial masyarakat Kecamatan Serengan yang beraneka ragam membuat kecamatan ini begitu unik. Dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang tidak terlalu tinggi, serta dengan tingkat perekonomian

yang tidak bisa dibilang rendah, membuat masyarakat Serengan memiliki nilai tawar khusus dalam dunia politik.

Dengan mengangkat isu “wong cilik”, PDIP memang masih berjaya di kecamatan ini dalam beberapa pemilihan umum. Tantangan ini yang membuat partai-partai lain untuk berlomba berebut suara di Kecamatan Serengan ini.

Partai Amanat Nasional sebagai partai yang memiliki nilai historis erat dengan kota Surakarta berhasil mendulang suara yang cukup signifikan di Kecamatan Serengan ini. Sebagai partai nasionalis yang menawarkan perubahan, Partai Amanat Nasional merangkul kaum muda dan terpelajar untuk dididik menjadi kader-kader partai yang pada akhirnya nanti akan mewakili masyarakat duduk di kursi legislatif.

Kecamatan Serengan dengan tujuh kelurahan didalamnya memang bukan wilayah yang besar apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah kecamatan lain yang berada dalam lingkup pemerintahan kota Surakarta. Namun dalam wilayah yang cukup kecil itu terdapat jumlah kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Hal ini berarti komunikasi antar penduduk di wilayah kecamatan Serengan seharusnya dapat lebih aktif dan dinamis dibandingkan dengan kecamatan lain. Seandainya ada isu yang digulirkan maka niscaya isu tersebut akan cepat menyebar di segenap lapisan masyarakat kecamatan Serengan. Hal ini bisa merupakan salah satu keuntungan Partai politik yang berniat mendulang suara di wilayah Kecamatan ini dimana dengan sedikit usaha komunikasi politik yang dilakukan terhadap masyarakat, maka akan didapat hasil yang lebih maksimal.

Namun tidak semudah itu, partai politik masih harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti para pemilih tradisional yang masih kental keberadaannya. Pemilih tradisional ini yang tidak mau tahu apa yang ditawarkan partai sebagai program, juga tidak mempedulikan keberadaan partai selain partai yang telah diyakininya.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan di kecamatan Serengan meski tidak seberapa jumlahnya, namun menunjukkan bahwa masyarakat Serengan memiliki kemauan untuk bersatu dalam sebuah wadah didasari dengan visi, misi, dan ideologi yang sama. Hal ini merupakan pertanda yang baik bagi partai politik yang berniat untuk mendulang massa melalui sebuah organisasi masyarakat.

Di kecamatan Serengan sendiri belum dilakukan secara optimal, khususnya oleh Partai Amanat Nasional dalam kaitannya dengan komunikasi politik partai-organisasi kemasyarakatan. Masih sangat sedikit sekali kegiatan bersama yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dengan organisasi kemasyarakatan seputar Kecamatan Serengan. Kalaupun ada kegiatan yang dilakukan bersamaan itu hanya dalam waktu-waktu tertentu, atau dalam kata lain belum ada hubungan yang berkesinambungan antara Partai Amanat Nasional DPC Serengan dengan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sekitarnya. Budi Prihanto sebagai kepala Departemen Hubungan Lembaga Sosial dan Kemasyarakatan PAN DPC Serengan mengungkapkan:

Ada kegiatan bersama antara PAN dengan masyarakat sekitar maupun organisasi kemasyarakatan, bisa kita yang mengundang mereka atau

mereka yang mengundang kita. Yang khusus dengan organisasi kemasyarakatan kita pernah mendata mereka kemudian mengunjungi sekretariat mereka, ya semacam silaturahmi begitu lah.⁴⁴

Masyarakat dalam berkomunikasi dengan Partai Amanat Nasional hanya sebatas dapat melihat visi dan misi partai saja, walaupun ada sosialisasi hanya menjelang pemilihan umum saja. Pada dasarnya masyarakat merasa perlu dan penting untuk melakukan komunikasi politik dengan Partai. Karena dengan adanya komunikasi yang harmonis ini maka akan terjadi proses transfer ide serta gagasan juga masukan dari kalangan bawah untuk kemudian diteruskan ke tingkat atas oleh Partai politik. Melalui komunikasi politik masyarakat juga ingin mengetahui apakah program-program kerja Partai yang digembar-gemborkan semasa kampanye sudah berjalan atau belum dan apakah sudah sesuai dengan visi misi yang diusungnya.

Sebenarnya mau-mau saja kalo disuruh berkomunikasi dengan partai, kan kita bisa usul sesuatu agar diteruskan ke atas, daripada harus demo ke jalan capek-capek. Sekalian bisa juga kan untuk mengecek apakah program-program kerja yang sudah dijanjikan oleh partai atau caleg sudah dijalankan? Tapi untuk kesitu saya nggak begitu paham prosedurnya, apa kita harus datang kesana atau bisa sekedar bertemu dijalan dengan pengurus partai dan menyampaikannya?⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Budi Prihanto, 7 Oktober 2009

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Oktavianus, aktivis ormas Serengan, 7 Oktober 2009

Dengan berlangsungnya komunikasi politik yang berkesinambungan maka Partai politik juga telah melaksanakan salah satu fungsinya. Proses untuk merumuskan dan kemudian menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada di dalam masyarakat kepada pihak penguasa dinamakan artikulasi kepentingan. Berbagai pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada dalam masyarakat yang disalurkan oleh partai politik kepada pihak penguasa tersebut dapat berwujud tuntutan-tuntutan dan dapat pula berwujud dukungan-dukungan. Baik tuntutan dan dukungan ini lantas disalurkan kepada pemerintah. Apabila terdapat tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang ada kesamaan-kesamaan atau pun menyangkut masalah-masalah yang sama maka tuntutan dan dukungan itu dijadikan satu. Proses pengabungan tuntutan dan dukungan ini dinamakan agregasi kepentingan (interest aggregation). Dalam proses agregasi kepentingan ini mutlak diperlukan adanya komunikasi politik yang selaras, harmonis dan berkesinambungan.

Komunikasi melalui organisasi anggota merupakan hubungan antara Partai politik dengan pemilih yang sangat erat. Melalui hubungan tersebut Partai politik dapat merekrut anggota-anggota baru sebagai kader partai maupun sebagai konstituen partai. Keuntungan lain adalah pada umumnya anggota Partai mengkomunikasikan dan mempromosikan program partai kepada masyarakat luas.

C. Realitas Hubungan Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional – Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan Surakarta

Kecamatan Serengan dengan wilayahnya yang tidak begitu luas namun memiliki kepadatan penduduk yang tinggi merupakan target untuk meraih suara bagi setiap partai politik. Partai Amanat Nasional(PAN) sebagai salah satu partai politik yang turut bermain dalam perebutan suara di Kecamatan Serengan melakukan segala daya upaya untuk meraup suara, termasuk berhubungan baik dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berada di Kecamatan Serengan.

Komunikasi politik adalah hal yang mutlak untuk dilakukan ketika sebuah partai politik berkeinginan mendulang massa. Melakukan komunikasi politik tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa sebuah perencanaan yang sistematis, pun tidak akan menuai hasil yang menggembirakan bila tidak dilakukan secara berkesinambungan.

Partai Amanat Nasional DPC Serengan sudah melakukan langkah-langkah komunikasi politik dengan konstituennya di daerah tersebut. Langkah yang diambil terbagi dalam dua hal yaitu langkah formal dan non formal.

Langkah formal seperti halnya mengadakan sosialisasi program partai dengan cara mengumpulkan perwakilan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, atau juga melakukan kunjungan-kunjungan langsung ke *grassroot* meski hanya dilakukan dalam masa-masa kampanye saja. Sedangkan langkah non formal adalah dengan mengirimkan perwakilan dari DPC setiap ada kegiatan di

Kecamatan Serengan atau juga memberikan bantuan kepada korban banjir yang sering melanda apabila musim penghujan tiba.⁴⁶

PAN dan kebanyakan partai politik di Indonesia saat ini masih bersifat sentralistik, artinya pengaruh struktural organisasi terhadap DPC (sebagai ujung tombak hubungan partai dengan masyarakat) masih sangatlah besar. DPC menjadi tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan metode apa yang akan dipakai dalam berkomunikasi dengan masyarakat, karena semua harus mendapat restu dari “atas” terlebih dahulu. Padahal pihak DPC-lah yang posisinya paling dekat dengan masyarakat, dan paling mengetahui karakter masyarakat di lingkungannya. Memang ada program kerja yang bisa disusun sendiri oleh pihak DPC, namun secara garis besar sudah ditentukan dari pusat.

Bahkan ada semacam upaya pengkerdilan atau lebih ekstrimnya lagi penghapusan fungsi-fungsi DPC dari pusat”, seperti yang diungkapkan oleh Marjanto⁴⁷

Dalam sudut pandang organisasi kemasyarakatan, komunikasi yang dilakukan oleh Partai politik hanya bersifat insidental saja, tidak ada komunikasi yang kontinyu. Dapat ditebak bahwa komunikasi hanya gencar dilakukan menjelang Pemilu. Hal ini membuat kepercayaan

⁴⁶ Wawancara dengan Marjanto, ketua DPC PAN Serengan, 5 Oktober 2009

⁴⁷ Wawancara dengan Marjanto, ketua DPC PAN Serengan, 5 Oktober 2009

terhadap partai politik sangatlah minim, organisasi kemasyarakatan menjadi merasa keberadaan partai politik di daerahnya menjadi tidak begitu penting bagi mereka. Kontribusi partai politik bagi organisasi kemasyarakatan pun hampir dirasa tidak ada.⁴⁸

Penggunaan media oleh PAN Serengan belum dilakukan secara maksimal, buletin yang pernah terbit tidak bertahan karena beberapa hal. Sedangkan pemanfaatan internet bagi media sarana sosialisasi dirasa tidak efektif, karena tidak semua orang paham mengenai internet. Jadi komunikasi yang selama ini masih dipertahankan adalah komunikasi secara langsung. Melakukan kegiatan sosial bersama-sama dengan masyarakat masih menjadi pilihan favorit dalam kaitannya berkomunikasi dengan masyarakat, seperti memberikan bantuan kepada korban banjir dan lain-lain. Feedback dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sendiri dirasa sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Tidak ada masukan-masukan yang berarti bagi pengembangan partai.

Secara keseluruhan, tidak banyak yang bisa diamati dari hubungan komunikasi antara PAN DPC Serengan dengan organisasi kemasyarakatan disekitarnya. Komunikasi politik yang dijalankan oleh Partai Amanat Nasional dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Serengan dilakukan dengan kurang optimal. Mulai dari program kerja yang tidak begitu mendukung kegiatan komunikasi politik dengan organisasi kemasyarakatan, hingga faktor dari organisasi

⁴⁸ Disarikan dari wawancara dengan para aktivis organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Serengan

kemasyarakatan sendiri yang tidak begitu antusias untuk berkomunikasi dengan partai politik menjadi hambatan-hambatan yang mengganggu kelancaran proses komunikasi politik.

D. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Komunikasi Politik Parpol dengan Organisasi Kemasyarakatan

Image yang kuat adalah salah satu yang akan dapat memotivasi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya kepada sebuah partai politik. Dengan adanya image yang kuat maka pemilih akan menjadi lebih yakin akan reputasi dari partai politik yang bersangkutan, hal ini akan memotivasi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya dan juga merekomendasikannya kepada orang lain.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa membangun sebuah image politik tidak dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi politik. Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah semua hal yang dilakukan oleh partai politik untuk mentransfer sekaligus menerima umpan balik tentang isu-isu politik berdasarkan semua aktifitas yang dilakukan terhadap masyarakat.⁴⁹ Isu yang dapat diangkat dalam rangka memperkuat image sebuah partai politik diantaranya dapat berupa ideologi partai, program kerja partai, profil pemimpin partai, latar belakang pendirian partai, visi dan tujuan jangka panjang partai serta permasalahan-permasalahan yang diungkapkannya.

⁴⁹ Firmansyah, *Marketing Politik, antara pemahaman dan realitas*, Yayasan Obor Indonesia, 2007

Tipologi dari partai politik mempengaruhi bagaimana komunikasi politik yang dijalankan. Tipe partai politik sendiri setidaknya ditentukan oleh dua hal yang mendasar, yaitu banyaknya pendukung beserta karakternya dan kedekatan dari elemen-elemen yang menopang. Pada partai massa, karena jumlah massanya yang besar, biasanya komunikasi politik yang dilakukan adalah melalui media massa, atau secara tidak langsung. Hal ini beralasan akan dapat lebih memperoleh cakupan yang lebih besar hanya dengan sekali proses komunikasi. Sedangkan pada partai politik yang bertipe kader dengan jumlah massanya yang relatif kecil, maka komunikasi politik yang dilakukan bersifat langsung. Kemudian jika sebuah partai memiliki karakter ideolog, komunikasi politik yang dilakukan biasanya bersifat monolog atau langsung dari partai terhadap konstituennya, hal ini dilakukan karena partai harus terus menerus menyalurkan ideologinya terhadap konstituennya.

Tipe komunikasi politik yang dilakukan juga menyangkut tingkat heterogenitas konstituennya. Biasanya jika konstituen partai semakin heterogen, maka komunikasi yang dilakukan bersifat dialog, baik secara langsung ataupun lewat media, sehingga keheterogenitasan massanya tersebut dapat dijembatani sehingga tidak terjadi bias persepsi dari para konstituen terhadap ideologi partainya.

Proses berlangsungnya komunikasi antar Parpol dengan Ormas tidak bisa selalu berjalan dengan mulus. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi proses komunikasi tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat

berupa faktor pendukung dan dapat pula berupa faktor penghambat. Berdasarkan data hasil dari penelitian di lapangan, diperoleh beberapa faktor yang sekiranya menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam proses komunikasi politik antara Partai Amanat Nasional dengan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Serengan.

D.1. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG

D.1.1. Faktor Pendukung Dari Partai politik

D.1.1.1 Soliditas Partai politik

Tingkat soliditas partai politik merupakan jaminan awal akan suksesnya sebuah partai dalam pertarungan politik. Sebuah partai yang solid akan dapat dengan mudah menjalankan semua program kerjanya, termasuk didalamnya melakukan komunikasi politik dengan konstituennya. Apabila didalam sebuah partai politik terdapat konflik internal, apalagi sampai yang menjurus pada perpecahan, maka program kerja partai akan sedikit terabaikan dikarenakan masing-masing elemen partai disibukkan dengan mempertahankan idealisme masing-masing dan mengabaikan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan partai itu sendiri. Dengan demikian maka hasil

yang dicapai partai politik tersebut akan tidak maksimal. Hal ini diakui oleh Marjanto, sebagai ketua DPC Serengan:

Perbedaan yang paling mencolok antara kepemimpinan Pak Amin dengan Pak SB adalah kalo dulu belum banyak konflik-konflik internal partai, sehingga semua komponen partai dapat mengoptimalkan fungsi-fungsinya, dan dapat menyaksikan sendiri bahwa perolehan suara PAN dari pemilu ke pemilu semakin menurun, saya tidak menyalahkan kepemimpinan sekarang, namun lebih menyayangkan banyaknya konflik-konflik internal partai, sehingga kesannya tidak solid gitu.⁵⁰

Tingkat soliditas Partai yang tinggi juga akan memperlancar komunikasi politik yang berlangsung. Apabila ada kebijakan baru maka partai akan dapat dengan mudah menyalurkannya kepada para konstituen partai tersebut, begitu pula sebaliknya, apabila konstituen memiliki aspirasi akan dapat menyalurkannya melalui perangkat partai tingkat desa yang akan dilanjutkan ke atas oleh perangkat partai tersebut. Hal ini niscaya dilakukan tanpa adanya koordinasi yang baik dalam sebuah partai yang solid. Oleh karena itu tingkat

⁵⁰ Wawancara dengan Marjanto, ketua DPC PAN Serengan, 5 Oktober 2009

kesolidan partai sangat berperan hubungan komunikasi politik antara partai dengan konstituennya.

D.1.1.2. Kesadaran akan pentingnya Ormas bagi Partai

Organisasi kemasyarakatan disini lebih dipandang sebagai konstituen partai yang bergabung dalam sebuah wadah organisasi. Seberapa jauh partai politik melakukan hubungan komunikasi politik dengan organisasi kemasyarakatan menjadi tolok ukur kita untuk menilai apakah partai politik tersebut menyadari akan pentingnya organisasi kemasyarakatan. Seringkali organisasi kemasyarakatan hanya dipandang sebagai sumber penghasilan suara saja bagi partai politik, sehingga komunikasi politik yang dilakukan hanya sebatas menjelang Pemilu saja. Setelah Pemilu usai, maka berakhirilah juga hubungan komunikasi politik partai tersebut dengan organisasi kemasyarakatan.

Semestinya partai politik sadar akan pentingnya menjalin hubungan yang harmonis dengan organisasi kemasyarakatan di sekitarnya, terlepas itu adalah sumber pendapatan suara bagi partai atau bukan. Dengan menjalin hubungan yang baik antara partai dengan ormas, maka akan dapat diperoleh masukan-masukan yang berarti bagi partai politik, dan bukan tidak mungkin apabila sebuah partai dapat membangun

hubungan yang baik dengan organisasi kemasyarakatan, maka partai tersebut akan mendapat simpati dari para anggota organisasi tersebut sehingga menjadi konstituen partai.

Kita berusaha menjaga hubungan baik dengan organisasi kemasyarakatan di Serengan ini mas, menurut saya pribadi keberadaan mereka penting, karena saya memposisikan mereka sebagai partner, sebenarnya saya berharap ada input-input dari organisasi kemasyarakatan itu, namun mungkin ada satu atau dua hal yang membuat mereka enggan untuk berkomunikasi dengan kami. Kami selalu membuka diri kok untuk segala masukan, kritik maupun saran.⁵¹

Tidaklah sulit bagi partai politik untuk membina hubungan dengan organisasi kemasyarakatan di sekitarnya. Cukup dengan memberikan informasi seputar partai dan program kerjanya kepada organisasi kemasyarakatan, melibatkan warga sekitar anggota ormas pada kegiatan partai, serta memberikan dukungan moril kepada ormas saja sudah dapat mengontrol tingkat keharmonisan hubungan partai politik dengan organisasi kemasyarakatan di sekitarnya.

⁵¹ Wawancara dengan Marjanto, ketua DPC PAN Serengan, 5 Oktober 2009

D.1.1.3. Keinginan Partai politik untuk melakukan komunikasi politik dengan ormas.

Komunikasi politik adalah sebuah keniscayaan bagi Partai politik. Komunikasi politik penting dilakukan dalam rangka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai, serta untuk menggali input dari konstituen. Setiap Partai politik tentu sadar akan pentingnya sebuah komunikasi politik dilakukan, namun dibalik kesadaran itu apakah terdapat keinginan yang kuat atau tidak untuk melakukan komunikasi politik.

Ormas sebagai salah satu faktor penting didalam masyarakat, yang bisa juga disebut sebagai lumbung suara bagi partai politik seharusnya mendapat perhatian khusus dari sebuah partai. Hal ini tidak lepas dari efisiensi dalam melakukan komunikasi politik, karena dibandingkan menjaring suara dari orang perorang, kenapa tidak sekalian saja mentransfer idealisme partai kepada satu kelompok orang yang sudah memiliki dasar kesamaan dalam beberapa hal. Tentu saja dari mempengaruhi idealisme sekelompok orang dengan persamaan-persamaan tersebut akan lebih berprospek untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Tentu saja PAN ingin mengadakan komunikasi dengan ormas-ormas di Serengan ini, bahkan di

dalam PAN sendiri ada badan khusus yang menangani soal hubungan dengan ormas ini⁵²

D.1.1.4. Perencanaan komunikasi politik oleh Partai politik

Secara keseluruhan partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategis dalam melakukan hubungan dengan masyarakat. Perencanaan ini menyangkut produk politik yang akan dibawakan, image yang akan dimunculkan, program kampanye yang akan dilakukan dan strategi penggalangan massanya.

Perencanaan perlu dilakukan agar alokasi sumber daya seperti manusia, keuangan, infrastruktur dapat dilakukan dengan efisien. Selain itu, perencanaan dibutuhkan agar setiap program dan aktivitas partai memiliki kesamaan gerak dan arah.

Dalam program kerja baik yang berupa instruksi dari DPD maupun yang dirumuskan sendiri oleh pihak DPC selalu ada yang berkaitan dengan komunikasi politik, tapi tidak selalu yang spesifik komunikasi dengan pihak-pihak tertentu seperti

⁵² Wawancara dengan Marjanto, ketua DPC PAN Serengan, 5 Oktober 2009

ormas misalnya, tapi pada intinya ada kok perencanaan kegiatan ini⁵³

Perencanaan berarti juga mengaitkan antara satu aktivitas dengan aktivitas lain, dengan demikian akan terjalin sinergi dan konsistensi di antara program-program kerja yang akan dihasilkan oleh suatu partai politik. Manfaat dari perencanaan secara lebih jauh lagi akan memberikan image dan pesan khusus mengenai keseluruhan aktivitas yang dilakukan. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam mengartikan dan memaknai program kerja serta isu politik yang diusung oleh sebuah Partai politik.

D.1.1.5. Adanya Program Kerja Partai yang Menunjang

Komunikasi Politik dengan Organisasi Kemasyarakatan

Komunikasi politik memerlukan sebuah implikasi konkrit dalam bentuk program kerja agar tidak hanya sekedar menjadi wacana saja. Program kerja disini dapat berupa apa saja, namun yang pokok adalah harus melibatkan Organisasi Kemasyarakatan. Program kerja yang realistis dapat berupa pertemuan atau dialog dengan organisasi kemasyarakatan, dimana dalam acara tersebut partai politik dapat memperoleh

⁵³ Wawancara dengan Budi Prihanto, 7 Oktober 2009

masuk-masukan dari masyarakat, dan juga partai politik dapat mengkomunikasikan program kerja terbaru yang akan dilaksanakan.

Apabila terjalin sebuah komunikasi yang harmonis, maka pastilah akan dapat dengan mudah meraih hati dari organisasi kemasyarakatan tersebut untuk memilih Partai politik yang bersangkutan untuk bernaung.

Program kerja dapat juga berupa hal-hal yang berkaitan dengan minat masyarakat di sekitar organisasi

kemasyarakatan itu berada. Seperti mengadakan turnamen olahraga antar Organisasi Kemasyarakatan misalnya.

Dengan interaksi yang berkelanjutan meski sekecil apapun, akan memberikan dampak yang positif bagi Partai politik.

D.1.1.6. Adanya Departemen dalam Partai yang membidangi Komunikasi Politik

Efektifitas pelaksanaan fungsi komunikasi politik dalam sebuah Partai politik akan terjadi apabila terdapat sebuah departemen atau divisi atau bagian yang menangani khusus tentang komunikasi politik tersebut. Departemen atau divisi inilah yang akan bertugas untuk mengkondisikan partai untuk siap berkomunikasi politik dengan masyarakat.

Penyusunan agenda komunikasi politik yang akan dilakukan,

sasaran yang ingin dituju, dan segala hal yang berkaitan dengan komunikasi Politik menjadi tanggung jawab dari divisi atau departemen ini.

Tentu saja PAN ingin mengadakan komunikasi dengan ormas-ormas di Serengan ini, bahkan di dalam PAN sendiri ada badan khusus yang menangani soal hubungan dengan ormas ini⁵⁴

Dengan era internet seperti sekarang ini, tugas dari divisi komunikasi politik Partai menjadi bertambah. Menyediakan website partai sehingga dapat untuk sarana komunikasi dua arah antara Partai dengan konstituen sudah merupakan keharusan di era modern ini. Penyusunan dan penataan website yang sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang jelas dan lugas terhadap masyarakat luas akan membantu membangun citra dari Partai politik itu sendiri.

D.1.2. Faktor Pendukung Dari Organisasi Kemasyarakatan

D. 1.2.1. Harapan yang Tinggi Terhadap Partai politik

Tentu saja ada sebuah pengharapan yang tinggi terhadap sebuah partai politik ketika seseorang memberikan

⁵⁴ Wawancara dengan Marjanto, ketua DPC PAN Serengan, 5 Oktober 2009

suaranya kepada partai yang bersangkutan. Harapan itu setidaknya adalah bahwa partai yang mereka pilih akan memperjuangkan aspirasi, hak-hak mereka serta meningkatkan kesejahteraan mereka hingga ke tingkat pusat.

Seiring dengan pendidikan politik masyarakat yang semakin membaik, maka pengharapan-pengharapan masyarakat terhadap partai politik juga semakin kuat. Masyarakat tahu bahwa tugas Partai politik kepada masyarakat memang memperjuangkan hak-hak dan suara masyarakat umum sampai ke tingkat pusat karena merekalah yang punya akses sampai ke situ. Inilah yang harus dijaga oleh Partai Poitik. Tingkat kepercayaan dan pengharapan masyarakat yang tinggi terhadap partai inilah yang akan membuat suara dari sebuah Partai politik menjadi stabil, dan akan meningkat apabila masyarakat puas dengan kinerja partai. Seperti yang diungkapkan Okta, salah satu aktivis ormas ketika ditanya mengenai harapan kepada partai politik berikut ini:

Harapan saya terhadap partai politik pada umumnya ya mungkin dengan keberadaan mereka dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, caranya ya dengan anggota-anggota dewan dari partai itu

benar-benar membela kepentingan rakyat, bukannya malah menumpuk kekayaan pribadi⁵⁵

Partai Amanat Nasional sebagai partai yang nasionalis dan moderat telah berupaya untuk menjaga tingkat pengharapan masyarakat terhadap partai ini. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan khusus berharap suara dapat diraih dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya yang sedang getol di bidik oleh Partai Amanat Nasional adalah suara dari para pemilih pemula atau generasi muda. Dengan seorang pemimpin Partai dari seorang tokoh yang masih muda, dan dengan visi-misi yang sesuai dengan idealisme anak muda diharapkan Partai Amanat Nasional akan tetap mampu bertahan ditengah serbuan partai-partai politik baru yang meramaikan atmosfer demokrasi Indonesia.

D.1.2.2 Pandangan bahwa Komunikasi politik itu penting

Komunikasi politik antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan tidak akan terjadi apabila hal tersebut memang tidak dikondisikan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Kesadaran bahwa melakukan komunikasi politik itu penting tidak hanya harus dimiliki oleh partai

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Oktavianus, aktivis ormas Serengan, 7 Oktober 2009

politik saja. Namun organisasi kemasyarakatan juga harus menyadari bahwa melakukan komunikasi politik terhadap partai politik tidaklah salah, bahkan penting untuk dilakukan. Dengan melakukan komunikasi politik maka akan bisa dilakukan transfer kepentingan antara Partai politik dengan organisasi kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan di kecamatan Serengan sendiri sebenarnya mau melakukan komunikasi politik dengan partai politik. Namun ada beberapa hal yang kemudian menjadikan keinginan tersebut hanya mentah sebagai keinginan saja tanpa ada wujud realisasinya.

D.1.2.3. Tingkat Loyalitas

Loyalitas konstituen terhadap partai politik merupakan salah satu faktor utama pendukung terjadinya komunikasi politik yang dinamis. Dalam hal komunikasi politik organisasi kemasyarakatan dengan partai politik dapat kita lihat jelas perbedaannya. Organisasi kemasyarakatan yang sudah jelas-jelas berafiliasi dengan partai politik yang bersangkutan pasti akan secara aktif melakukan komunikasi politik dengan partai. Berbeda dengan organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki ikatan politik apapun terhadap partai. Komunikasi politik dilakukan sekedarnya saja, dan apabila ada yang memfasilitasi dan memulainya.

Memang suara dari warga Muhammadiyah merupakan suara mayoritas bagi PAN, namun tingkat loyalitas warga Muhammadiyah tidak semilitan warga NU untuk PKB, jadi kalau hanya sekedar mengandalkan suara dari warga Muhammadiyah saja tidaklah cukup⁵⁶

Dalam Partai Amanat Nasional, fenomena loyalitas terhadap partai politik ini telah bergeser. Menurut survei yang dilakukan oleh LP3S, tingkat loyalitas pemilih Partai Amanat Nasional bergeser dalam Pemilu 2009 ini. Warga Muhammadiyah yang dahulu menjadi pemilih utama PAN kini beralih ke Partai politik yang lain. Sementara Partai Amanat Nasional malah memiliki kecenderungan memperoleh suaranya dari para pemilih baru.

D.2. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT

D.2.1. Faktor Penghambat Dari Partai politik

D.2.1.1. Konflik Internal Partai

Berbagai permasalahan yang muncul didalam tubuh pengurus Partai Amanat Nasional sedikit banyak mengganggu proses berjalannya komunikasi politik

⁵⁶ Wawancara dengan Marjanto, ketua DPC PAN Serengan, 5 Oktober 2009

yang seharusnya dilakukan oleh partai. Pengurus telah disibukkan dengan urusan-urusan internal partai sehingga melupakan fungsi komunikasi politik yang dimiliki oleh Partai politik. Akibatnya banyak aspirasi dari konstituen yang terabaikan. Hal ini lebih-lebih terjadi diluar agenda Pemilu. Lain halnya dengan masa-masa Pemilu, partai manapun tentu saja akan berlomba-lomba untuk menarik massa dengan rajin berkomunikasi politik dengan siapapun dan dimanapun.

D.2.1.2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik dari Partai

Antara fungsi satu dengan yang lain dari keseluruhan fungsi partai politik adalah saling berhubungan. Apabila salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu optimalisasi fungsi yang lain. Sebagai salah satu fungsi dari Partai politik, peran Pendidikan Politik sangatlah penting. Dengan pendidikan politik maka masyarakat akan tahu apa saja hak-hak dan kewajiban mereka dalam politik. Hal ini akan mendukung pelaksanaan komunikasi politik sebagai fungsi selanjutnya dari partai politik. Menjelang pelaksanaan Pemilu, fungsi partai politik

yang paling kentara adalah fungsinya sebagai rekrutmen politik. Partai dengan membabi-butakan berusaha merekrut kader-kader partai baru yang kemudian sedikit mengabaikan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pendidikan politik tadi.

Selama ini masyarakat masih belum begitu memahami mengenai posisi mereka dalam kehidupan politik, bahkan fungsi-fungsi partai politik saja mereka juga tidak memahami, sebatas bahwa partai politik menempatkan wakil-wakilnya di pemerintahan. Masih ditambah pula dengan kesan negatif dari politik dalam masyarakat yang terkesan kotor, dan berisi banyak manipulasi serta saling menjatuhkan. Hal semacam ini yang membuat masyarakat semakin tidak mau tahu dengan politik. Dengan kondisi yang seperti inilah komunikasi politik tidak akan berjalan optimal. Ketika masyarakat sudah tidak mau tahu dengan politik, maka komunikasi politik-pun tidak akan berjalan dengan semestinya dan proses artikulasi kepentingan juga akan mengalami hambatan, begitu seterusnya sehingga dapat dikatakan bahwa apabila pendidikan politik tidak lancar maka komunikasi politik juga akan tersendat.

Sosialisasi Pemilu adalah hal paling sederhana menyangkut pendidikan politik yang pernah dilaksanakan oleh Partai Amanat Nasional DPC Serengan. Kegiatan lainnya seperti sosialisasi hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik memang belum pernah dilakukan, karena masyarakat bisa mendapatkannya dari sumber-sumber lain seperti televisi dan surat kabar. Di samping itu masyarakat juga tidak tertarik dengan program-program partai yang sifatnya formal.⁵⁷

D.2.1.3. Program Kerja Partai

Setiap Partai politik memiliki program kerja yang diantaranya pasti ada yang berkenaan dengan komunikasi politik. Dengan keberadaan program kerja ini apabila berjalan dengan lancar akan dapat menunjang pelaksanaan komunikasi politik. Namun kadang kala yang terjadi malahan sebaliknya, program kerja partai malah menghambat kelangsungan komunikasi politik yang seharusnya dilakukan partai

⁵⁷ Wawancara dengan Maryanto, Ketua DPC PAN Serengan, 5 Oktober 2009

politik. Hal ini dapat terjadi karena kadang ada program partai yang lain yang dirasa lebih mendesak untuk dilakukan atau lebih diprioritaskan untuk dilakukan daripada program untuk komunikasi politik. Kemudian adanya kejadian-kejadian tidak terduga seperti bencana alam (banjir) misalnya, hal ini juga mengganggu kelancaran program partai yang berkaitan dengan komunikasi politik. Karena partai akan mencurahkan perhatiannya untuk membantu korban bencana alam tersebut, sehingga program-program yang lain untuk sementara diabaikan terlebih dahulu.

D.2.1.4. Pendanaan

Hal lain yang sering menjadi penghambat komunikasi politik adalah pendanaan. Kadang membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan program kerja komunikasi politik. Dengan pendanaan partai yang tidak menentu membuat program tersebut sulit untuk dilakukan dan akhirnya dilewatkan begitu saja.

Dengan sumber dana yang terbatas, kadangkala partai memprioritaskan beberapa program terlebih dahulu yang dirasa mendesak dengan alokasi dana

tercurah pada program tersebut, otomatis hal ini akan menghambat program-program yang lain. Dengan terhambatnya program kerja maka komunikasi politik partai pun juga tidak akan berjalan dengan lancar, karena kurang *dimanage* dengan baik.

D.2.1.5. Sosialisasi yang Kurang

Seperti yang sudah sedikit disinggung pada tulisan sebelumnya bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia adalah pasif dalam hal politik. Untuk mengatasi hal ini maka sosialisasi dari Partai sangatlah penting untuk dilakukan. Melalui sosialisasi rakyat dibuat paham akan cara-cara berkomunikasi dengan partai serta rakyat dibuat paham tentang akses-akses untuk berhubungan dengan partai secara langsung. Dengan sosialisasi pula masyarakat diberikan informasi tentang program-program kerja partai yang akan dan telah dilaksanakan.

Sosialisasi disini bentuknya dapat beragam. Seperti membuat buletin partai, menghadiri pertemuan warga, atau yang selama ini sudah dijalankan oleh PAN dan mungkin oleh partai-partai lainnya adalah dengan

memanfaatkan teknologi internet, yaitu dengan membuat website partai.

Namun sayang sekali sosialisasi semacam itu masih jarang dilakukan oleh partai politik, khususnya PAN. Soal website partai memang sudah ada dan sudah dipublish sekian lama namun tingkat keakuratan serta kekomplitan data masih sangat kurang.

Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh PAN DPC Serengan masih berupa sosialisasi langsung, yaitu bertemu langsung dengan warga/organisasi kemasyarakatan. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang menggunakan media hanya sebatas mengeluarkan buletin partai, itu pun tidak diurus langsung oleh pihak DPC tapi dari pusat.⁵⁸

D.2.1.6. Pola organisasi partai yang sentralistik

Hal lain yang sering menjadi hambatan komunikasi politik antara partai dengan masyarakat/organisasi kemasyarakatan adalah sentralisasi partai. Pengurus DPC seringkali tidak memiliki wewenang untuk membuat program kerja

⁵⁸ Wawancara dengan Marjanto, tgl 29 Agustus 2009

sendiri. DPC sering hanya melakukan program kerja yang sudah ditentukan dari pusat, walaupun bisa membuat program sendiri harus mendapat persetujuan dulu yang kadang memerlukan proses yang lama.

Padahal untuk kegiatan yang menyangkut kondisi pemilih partai yang berada di daerah tentu saja pengurus daerahlah yang lebih banyak mengetahuinya, sehingga selama ini kebijakan-kebijakan partai sering tidak menyentuh masyarakat bawah, seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Marjanto, ketua DPC PAN Serengan.

D.2.2. Faktor Penghambat Dari Organisasi

Kemasyarakatan

D.2.2.1. Perbedaan Ideologi

Ideologi Partai politik yang sejalan dengan ideologi organisasi kemasyarakatan sedikit banyak akan membantu kelancaran proses komunikasi politik antara keduanya. Dengan memiliki ideologi yang sama, maka akan dapat dengan mudah menyelaraskan kemauan serta keinginan bersama, sehingga keduanya dapat terbina komunikasi yang selaras dan harmonis.

Sebagai contoh adalah banyaknya

organisasi-organisasi Islam yang bersinergi dengan Partai politik yang bernafaskan Islami. Namun sebaliknya, ideologi Partai politik yang tidak sejalan dengan ideologi organisasi kemasyarakatan dapat menghambat keberlangsungan komunikasi politik. Sebagai contoh dalam partai yang bernafaskan Islami, komunikasi politik kadang dilakukan dengan cara menyelenggarakan pengajian, tentu saja bagi organisasi kemasyarakatan non Islam hal ini tidak menguntungkan karena tidak sesuai dengan ideologi yang mereka anut.

Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Marjanto:

PAN DPC Serengan lebih sering melakukan kunjungan atau komunikasi politik terhadap organisasi-organisasi yang bernaung dibawah Muhammadiyah daripada kepada organisasi yang sifatnya umum.⁵⁹

D.2.2.2. Tingkat Partisipasi Politik

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa ada organisasi kemasyarakatan yang sama sekali tidak

⁵⁹ Wawancara dengan Marjanto, ketua DPC PAN Serengan tgl 29 Agustus 2009

bersentuhan dengan dunia politik, dan ada pula yang bersedia untuk menjadi organisasi mitra salah satu partai politik. Tingkat partisipasi politik dari organisasi kemasyarakatan itu sendiri mempengaruhi jalannya komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik.

Apabila dari awal memang sudah tidak ingin berurusan dengan politik, maka apapun yang dilakukan partai untuk membina komunikasi politik dengan organisasi tersebut akan sia-sia. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam politik inilah salah satu yang menjadi tantangan dari partai politik, mengingat salah satu fungsi dari partai politik adalah untuk pendidikan politik.

Tidak merasa bersinggungan langsung dengan politik dalam kegiatannya, dan tidak merasa diuntungkan apabila menjalin hubungan dengan partai politik membuat organisasi kemasyarakatan enggan berpartisipasi aktif dalam hal komunikasi politik dengan partai politik.

D.2.2.3. Kekecewaan Terhadap Partai politik

Perasaan kecewa dan tidak dibutuhkan atau membutuhkan untuk berkomunikasi politik dengan

Partai politik membuat organisasi kemasyarakatan enggan melakukan komunikasi politik. Hal ini dapat terjadi karena organisasi kemasyarakatan merasa suaranya tidak diakomodir oleh partai politik.

Seperti yang diungkapkan oleh Okta, seorang aktivis organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Serengan berikut:

Hal yang sangat wajar terjadi di Indonesia adalah partai politik berbondong-bondong dengan muka manis mendekati elemen-elemen masyarakat pada saat mendekati Pemilu, namun setelah berhasil meraup suara yang banyak maka tidak ada tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan atau dijanjikan sebelumnya.⁶⁰

Persepsi bahwa partai politik hanya menjadikan konstituen/organisasi kemasyarakatan sebagai sapi perahan menjelang pemilu akan merugikan partai politik itu sendiri, sebagai kumpulan orang-orang yang berpendidikan atau setidaknya melek politik, organisasi kemasyarakatan tentu saja akan berpikir dua kali

⁶⁰ Wawancara, tgl 7 Oktober 2009

apabila akan melakukan komunikasi politik dengan partai semacam ini.

Kekecewaan semacam inilah yang menjadikan terhambatnya proses komunikasi politik antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan.

D.2.3. Faktor Penghambat Dari Pemerintah

D.2.3.1. Tidak Adanya Peraturan Konkrit Yang Mengatur Tentang Mekanisme Komunikasi Politik Partai dengan Konstituennya

Peraturan yang mengatur tentang mekanisme komunikasi politik dengan konstituen tidak hanya menjadi tanggung jawab partai politik saja, namun idealnya disebuah negara terdapat sebuah peraturan yang mengatur tentang mekanisme komunikasi politik antara partai politik dengan konstituennya.

Peraturan tersebut dapat berisi tentang bagaimana seharusnya partai politik memperlakukan konstituennya, apa yang harus dilakukan partai politik terhadap konstituennya, serta hak dan kewajiban partai politik terhadap konstituennya, dan juga sebaliknya. Dengan adanya peraturan ini maka diharapkan partai politik tidak hanya

akan memperlakukan konstituennya sebagai vote getter saja menjelang Pemilu, namun akan ada proses imbal balik yang selaras dengan konstituennya sebagai “pemberi mandat” terhadap partai untuk berperan dalam pemerintahan negara dan meningkatkan kesejahteraan mereka(para konstituen).

Selain itu, jika ada peraturan tentang mekanisme hubungan komunikasi politik antara partai dengan konstituennya ini akan ada hal-hal yang harus dipatuhi antara kedua belah pihak, dimana jika ada pelanggaran maka akan ada sanksi yang nyata dan jelas, sehingga diharapkan antara partai politik dan konstituen masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan lebih baik dan terarah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dunia Politik yang penuh dengan intrik dan segala lika-likunya menyimpan berbagai macam hal yang menarik untuk di simak dan dicermati. Keberadaan Partai politik tidak pernah bisa dilepaskan dengan para konstituennya. Untuk menjaring konstituen tentu saja Partai politik harus melakukan upaya-upaya komunikasi politik. Komunikasi politik yang dilakukan partai politik bertujuan untuk mentransfer ideologi dan program kerja partai, yang dikemas sedemikian rupa untuk menarik simpati dari masyarakat agar menjadi konstituen partai tersebut.

Pola hubungan antara partai politik dengan konstituen didasarkan atas kebutuhan partai politik memperoleh suara pemilih dalam Pemilu.

Namun pola ini harus dikelola dengan baik supaya terjadi simbiosis yang saling menguntungkan antara partai politik dengan konstituen. Hubungan dan komunikasi yang konsisten antara Partai dengan konstituennya dapat menjadi stabilisator bagi partai, sebab pemilih akan merasa punya ikatan dan lebih akrab dengan partai sehingga akan berkontribusi lebih banyak kepada partai politik itu sendiri

Sebagai sebuah partai politik, Partai Amanat Nasional juga tidak luput dari kegiatan komunikasi politik ini. Selain melakukan upaya-upaya pendekatan dengan masyarakat umum, Partai Amanat Nasional juga melakukan komunikasi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berada di Kecamatan Serengan. Tentu saja upaya-upaya yang dilakukan tersebut tidak lepas dari berbagai hambatan, namun juga ada faktor-faktor yang mendukung.

Pada dasarnya, masyarakat bersedia untuk berkomunikasi dengan partai politik, tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah aspirasi mereka akan didengarkan oleh partai yang bersangkutan atau tidak. Selain itu juga tata cara untuk menyampaikan aspirasi kepada partai juga belum jelas mekanismenya. Apabila harus melalui mekanisme yang berbelit, maka masyarakat juga akan enggan untuk berkomunikasi dengan partai politik.⁶¹

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor yang berperan dalam proses hubungan komunikasi politik antara PAN dengan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Serengan Surakarta. Faktor-faktor tersebut

⁶¹ Wawancara dengan Abdul, aktivis organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Serengan

berupa faktor penghambat dan pendukung yang berasal dari partai politik(dalam hal ini PAN DPC Serengan) dan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Faktor pendukung dari Partai politik diantaranya adalah *pertama*, kesolidan partai politik itu sendiri, karena dengan kesolidan di dalam tubuh parpol itu sendiri maka akan dengan mudah menyusun dan melaksanakan program kerja, disamping itu juga akan memudahkan untuk melakukan koordinasi. *Kedua*, kesadaran akan pentingnya organisasi kemasyarakatan bagi partai politik, dengan menyadari pentingnya keberadaan organisasi kemasyarakatan maka partai politik akan melakukan komunikasi yang terus menerus dan berkesinambungan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban moral kepada organisasi kemasyarakatan tersebut. *Ketiga*, keinginan partai politik untuk melakukan komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan, meskipun pada dasar tujuannya adalah untuk meraup suara dari anggota-anggota organisasi kemasyarakatan, namun hal ini tidaklah menjadi masalah, karena setidaknya ada usaha-usaha pendekatan dari partai politik kepada organisasi kemasyarakatan. *Keempat*, perencanaan komunikasi politik oleh partai, dengan adanya perencanaan yang rapi dan sistematis maka akan melancarkan proses komunikasi politik itu sendiri. *Kelima*, adanya program kerja partai yang menunjang proses komunikasi politik, dengan memasukkan rencana-rencana komunikasi politik yang akan dilakukan dalam program kerja partai, maka semuanya akan berjalan dengan lancar dengan didukung koordinasi yang baik. *Keenam*, adanya departemen dalam partai yang khusus membidangi

komunikasi politik partai, departemen itu akan khusus berkonsentrasi tentang tatacara dan media yang akan digunakan untuk melakukan komunikasi politik.

Sedangkan faktor-faktor pendukung proses komunikasi politik antara Partai politik dan Organisasi kemasyarakatan yang berasal dari organisasi kemasyarakatan itu sendiri adalah; *pertama*, harapan yang tinggi kepada partai politik, dengan memiliki pengharapan yang tinggi untuk menyampaikan aspirasinya maka organisasi kemasyarakatan tentu akan dengan sukarela menjalin hubungan komunikasi politik dengan partai politik. *Kedua*, pandangan bahwa komunikasi politik itu penting, dengan menganggap bahwa komunikasi dengan partai politik itu penting dan membawa hal yang baik bagi organisasi, maka organisasi kemasyarakatan akan melakukan komunikasi dengan partai politik. *Ketiga*, tingkat loyalitas, ini berlaku bagi organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik. Dengan kadar loyalitas yang tinggi maka organisasi kemasyarakatan tidak segan-segan untuk berkomunikasi dengan partai politik, bahkan seringkali mengambil inisiatif untuk memulainya.

Sementara itu faktor-faktor penghambat terjadinya proses hubungan komunikasi politik antara Partai politik dengan organisasi kemasyarakatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang berasal dari Partai politik, Organisasi Kemasyarakatan, serta dari Pemerintah.

Faktor penghambat yang berasal dari dalam tubuh partai politik itu sendiri antara lain, *pertama*, konflik internal partai, hal ini jelas-jelas

mengganggu proses komunikasi politik, tatkala internal partai sedang ada konflik internal maka konsentrasi partai akan terpecah dan mengabaikan komunikasi politik dengan konstituennya yang seharusnya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. *Kedua*, belum optimalnya fungsi pendidikan politik partai politik, dikarenakan antara fungsi satu dan yang lain yang dipegang oleh partai politik adalah saling berkaitan, maka apabila fungsi pendidikan politik partai tidak maksimal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi politik partai. *Ketiga*, program kerja partai, selain menjadi pendukung ada kalanya program kerja yang disusun partai politik justru akan menjadi penghambat proses komunikasi politik, karena kadang ada program kerja yang dirasa lebih mendesak dari melakukan komunikasi yang kontinyu dengan konstituen. *Keempat*, pendanaan, komunikasi politik partai erat kaitannya dengan pencitraan. Untuk membentuk sebuah citra yang manis di mata masyarakat partai politik harus mengemas imagenya sedemikian rupa, kadang kala hal ini membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. *Kelima*, sosialisasi yang kurang, kurangnya sosialisasi mengenai tata cara berhubungan langsung dengan partai politik akan menghambat proses hubungan komunikasi politik itu sendiri. *Keenam*, pola organisasi yang sentralistik, kekurangluasaan untuk menentukan program sendiri kadang juga menghambat proses komunikasi politik.

Faktor-faktor penghambat proses komunikasi politik antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan yang berasal dari organisasi kemasyarakatan itu sendiri diantaranya, *pertama*, perbedaan ideologi,

apabila ideologi yang dianut oleh partai politik berbeda dengan ideologi dari organisasi kemasyarakatan itu sendiri, maka organisasi kemasyarakatan akan enggan melakukan komunikasi dengan parpol tersebut. Mereka lebih senang dan nyaman untuk melakukan hubungan komunikasi dengan partai yang sepaham dengan mereka. *Kedua*, tingkat partisipasi politik, bagi organisasi kemasyarakatan yang sama sekali enggan bersentuhan dengan politik maka proses hubungan dengan partai politik juga tidak akan berjalan dengan baik. *Ketiga*, kekecewaan terhadap partai politik.

Yang terakhir adalah faktor penghambat yang berasal dari pemerintah, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur mekanisme komunikasi politik antara partai politik dengan konstituennya, andaikata telah dibuat peraturannya niscaya legalitas dan kekuatan hukumnya akan lebih terjamin.

B. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi untuk partai politik dalam mengelola komunikasi dengan konstituennya yaitu, *pertama* Partai politik harus mempunyai kemampuan untuk merespon konstituen. Partai politik harus mampu mendengarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat. Disamping itu, partai politik harus tahu apa kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang kemudian dipakai sebagai dasar untuk menyusun program partai.

Kedua adalah dengan memaksimalkan penggunaan media. Partai politik harus mampu berkomunikasi langsung dengan konstituen melalui tatap muka. Komunikasi melalui organisasi-organisasi yang berfungsi sebagai mediator, seperti Serikat Buruh, Serikat Tani, Organisasi Pemuda, Organisasi Perempuan dll. Selain itu, juga dibangun komunikasi melalui media massa: Koran dan majalah, radio, tv, internet dengan website, email dan telepon. Dan juga yang tidak kalah pentingnya komunikasi dengan menggunakan media riset, polling dan survey.

Yang ketiga Komunikasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan kontinuitas. Komunikasi dengan konstituen tidak dilakukan hanya ketika akan ada Pemilu saja, melainkan diadakan secara terus menerus, sistematis dan berkelanjutan. Dengan pola komunikasi tersebut, maka konstituen dapat lebih mudah memahami partai politik dan politisi pilihannya.

Keempat, Partai harus mempunyai kemampuan untuk membangun pola, metode dan pendekatan komunikasi yang kreatif. Artinya, partai harus lebih kreatif untuk membangun komunikasi yang membuat konstituen dapat merasa nyaman, aman dan mantap bersama partai. Meningkatkan komunikasi yang sudah eksis di masyarakat (kelompok-kelompok strategis).

Kelima, pembuatan peraturan partai tentang komunikasi politik. Dengan peraturan ini, maka tidak ada alasan lain bagi politisi, pengurus dan aktivis partai untuk menghindar bagi terbangunnya komunikasi imbal balik dan saling menguntungkan antara partai dengan masyarakat pada umumnya dan pemilih khususnya.

Keenam, Partai harus mampu mengidentifikasi siapa anggota partai, siapa pemilihnya dan dimana masih ada potensi untuk baik menjadi anggota maupun pemilih. Identifikasi personal dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan bentuk-bentuk komunikasi yang harus dilakukan.

Ketujuh, pembuatan sekretariat. Pembuatan sekretariat di daerah pemilihan oleh tiap-tiap politisi dapat dipakai sebagai jembatan komunikasi dan sekaligus memelihara hubungan yang terus menerus dengan masyarakat terutama dengan pemilih. Sekretariat ini sebaiknya juga dikaitkan dengan struktur partainya sendiri di daerah pemilihan. Sekretariat tidak hanya melayani pemilih saja, melainkan juga seluruh masyarakat yang ada di daerah pemilihan tersebut.

Dengan demikian diharapkan hubungan komunikasi politik antara Partai politik dengan organisasi kemasyarakatan/konstituennya dapat berjalan dengan baik dan terstruktur serta tentu saja berjalan secara berkesinambungan. Dengan komunikasi yang lancar maka perasaan saling membutuhkan akan mudah tercipta sehingga terbentuklah sebuah hubungan yang harmonis antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan/konstituen, karena pada dasarnya partai politik membutuhkan suara dari masyarakat, dan masyarakatpun juga membutuhkan partai politik untuk mewakili menyuarakan aspirasi mereka.

LAMPIRAN

ANGGARAN DASAR PARTAI AMANAT NASIONAL

BAB I. NAMA, KEDUDUKAN dan LOGO

Pasal 1. Nama dan kedudukan

1. Partai ini bernama PARTAI AMANAT NASIONAL disingkat dengan PAN yang dibentuk dan dideklarasikan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus 1998 di Jakarta.
2. Dewan Pimpinan Pusat PAN berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 2. Logo

1. Nilai yang terkandung dalam logo PAN adalah dengan kehadiran partai ini diharapkan akan mampu membawa pencerahan ke arah masa depan Indonesia yang lebih baik.
2. Penjelasan terhadap logo PAN tertera dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II. ASAS, SIFAT dan IDENTITAS

Pasal 3. Asas

Partai Amanat Nasional berasaskan Pancasila.

Pasal 4. Sifat

PAN adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri.

Pasal 5. Identitas

Identitas partai ini adalah menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan.

BAB III. TUJUAN

Pasal 6.

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual.

BAB IV. USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan pada Pasal 6, maka PAN menjalankan usaha antara lain sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Indonesia baru, berdasarkan moral agama, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Membangun masyarakat madani yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, penindasan dan kekerasan.
3. Mewujudkan manusia Indonesia yang berdaulat, memiliki jati diri, cerdas, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membangun manusia Indonesia yang mampu menguasai dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa dan umat manusia.
5. Meningkatkan peran serta politik dan kontrol sosial masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
6. Meningkatkan kesadaran atas pelaksanaan kewajiban warga negara sebagai manusia dan kewajiban negara dalam penegakan hak-hak asasi manusia yang semakin terjamin dan bertanggung jawab.
7. Mengupayakan pertanggungjawaban yang terbuka dalam pengurusan negara melalui penguatan masyarakat madani dalam mengawasi kekuasaan.
8. Memperjuangkan peningkatan kemampuan daerah dalam mengembangkan kemandirian dalam mengurus sumber daya, mencari pendanaan dan menikmati hasil-hasilnya sehingga dapat mencegah disintegrasi nasional dan eksploitasi pusat terhadap daerah.
9. Memperjuangkan kebebasan pers yang memperhatikan norma-norma hukum, susila, akhlak dan kepatutan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang obyektif dan transparan.
10. Mengusahakan penegakan hukum tanpa diskriminasi sehingga semua masyarakat mendapat akses yang sama dalam lembaga peradilan yang independen, adil, murah dan cepat.
11. Memperjuangkan secara tegas pemisahan antara lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk menjamin proses dapat saling kontrol di antara lembaga-lembaga tersebut.
12. Mengupayakan peranan ABRI yang sesuai dengan fungsinya di bidang HANKAM, tunduk pada hukum, konstitusi dan kontrol publik.
13. Mengupayakan agar setiap warga negara memiliki akses langsung pada penguasaan dan pemilikan tanah, pengakuan hak ulayat, dan mengembalikan fungsi sosial yang melekat pada tanah.
14. Mengusahakan persamaan hak Perempuan secara proporsional sebagai insan yang harus dihormati dengan memberikan kesempatan yang sama di mata hukum, sosial, ekonomi dan politik.
15. Mewujudkan kesejahteraan sosial lewat pemerataan yang berlandaskan moralitas agama serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

16. Memperjuangkan pemberian kesempatan yang sama bagi semua pelaku ekonomi untuk mewujudkan segala potensi yang dimiliki bagi penguatan daya saing nasional.
17. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan nasional yang mampu meningkatkan sumber daya manusia yang merangsang kemandirian dan kreativitas.
18. Memperjuangkan perlindungan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dari keserakahan manusia untuk menjamin keadilan antar generasi.
19. Memperjuangkan kebijakan ekonomi yang memihak kepada yang lemah dan mendukung terciptanya keadilan bagi masyarakat luas.
20. Memperjuangkan berjalannya pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bab V. KEANGGOTAAN

Pasal 8.

Peraturan keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bab VI. SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

1.
 - a. Dewan Pimpinan Ranting ialah kesatuan anggota dan tingkat kepemimpinan di tingkat kelurahan / desa.
 - b. Dewan Pimpinan Cabang ialah kesatuan anggota dan kepemimpinan di tingkat kecamatan.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah ialah kesatuan anggota dan kepemimpinan di daerah tingkat II.
 - d. Dewan Pimpinan Wilayah ialah kesatuan anggota dan kepemimpinan di daerah tingkat I.

Dewan Pimpinan Pusat ialah kesatuan anggota dan kepemimpinan yang berada di tingkat pusat.

2. Di setiap tingkat kepemimpinan di bentuk Majelis Pertimbangan Partai (MPP), yang berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Partai.
3. Di setiap tingkat kepemimpinan dapat dibentuk Badan Otonomi dan lembaga / Panitia khusus yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Ketentuan tentang hubungan struktural antara DPW, DPD, DPC dan DPRt diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10.

Pimpinan Organisasi

5. Dewan Pimpinan Pusat
 - a. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi dalam memimpin partai .
 - b. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan dalam kongres.
 - c. Anggota Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - Majelis Pertimbangan Partai.
 - Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
6. Dewan Pimpinan Wilayah
 - a. Dewan Pimpinan Wilayah memimpin partai di wilayahnya dan melaksanakan kepemimpinan dari Pimpinan Pusat.
 - b. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah wilayah untuk masa jabatan 5 tahun.
 - c. Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah berdasarkan hasil musyawarah wilayah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan.
 - d. Anggota Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari :
 - Majelis Pertimbangan Partai wilayah. - Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan Wilayah.
7. Dewan Pimpinan Daerah
 - a. Dewan Pimpinan Daerah memimpin partai di daerahnya dan melaksanakan kepemimpinan dari Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah untuk masa jabatan 5 tahun.
 - c. Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah hasil Musyawarah daerah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan surat

keputusan yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang.

d. Anggota Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :

- Majelis Pertimbangan Partai Daerah.- Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan Daerah.

8. Dewan Pimpinan Cabang

- a. Dewan Pimpinan Cabang memimpin partai dalam cabangnya dan melaksanakan kepemimpinan dari Dewan Pimpinan Daerah.
- b. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah cabang untuk masa jabatan 5 tahun.
- c. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang hasil musyawarah cabang disahkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dengan surat keputusan yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Ranting.
- d. Anggota Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :

- Majelis Pertimbangan Partai cabang.

- Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan Cabang.

9. Dewan Pimpinan Ranting

- a. Dewan Pimpinan Ranting memimpin partai dalam rantingnya dan melaksanakan kepemimpinan dari Dewan Pimpinan Cabang.
- b. Pengurus Dewan Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah ranting untuk masa jabatan 5 tahun.
- c. Kepengurusan pimpinan ranting hasil musyawarah ranting disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan surat keputusan yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah.
- d. Anggota Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari :

- Majelis Pertimbangan Partai ranting. - Seluruh anggota pengurus Dewan Pim-pinan Ranting.

BAB VII. PERMUSYAWARATAN

Pasal 11

1. Bentuk macam-macam permusyawaratan.

- 1.1. Kongres
- 1.2. Rapat Kerja Nasional
- 1.3. Rapat Paripurna
- 1.4. Musyawarah Wilayah
- 1.5. Rapat Kerja Wilayah
- 1.6. Musyawarah Daerah
- 1.7. Rapat Kerja Daerah
- 1.8. Musyawarah Cabang
- 1.9. Rapat Kerja Cabang
- 1.10. Musyawarah Ranting
- 1.11. Rapat Kerja Ranting
- 1.12. Kongres Luar Biasa
- 1.13. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
- 1.14. Musyawarah Daerah Luar Biasa
- 1.15. Musyawarah Cabang Luar Biasa
- 1.16. Musyawarah Ranting Luar Biasa
- 1.17. Rapat Pleno
- 1.18. Rapat Harian
- 1.19. Rapat Anggota Ranting

2. Hal-hal yang berkenaan dengan aturan permusyawaratan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bab VIII. ACARA PERMUSYAWARATAN

Pasal 12.

Acara permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bab IX. MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 13

Masa Jabatan ketua Umum dalam Dewan Pimpinan Pusat serta jabatan ketua dalam tingkat DPW, DPD, DPC, dan DPRt paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan tidak dapat dipilih kembali.

BAB X. KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

Korum dan pengambilan keputusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI. HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 15

Hak suara dan hak bicara dalam permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII. SUMBER KEUANGAN

Pasal 16

Sumber keuangan partai terdiri dari :

1. Uang iuran anggota
2. Usaha, sumbangan dan infak
3. Hibah dan wasiat
4. Sumber sumber lain yang dianggap halal dan tidak mengikat.

Bab XIII. PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

Pengesahan Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya disahkan dalam Rapat Formatur pada tanggal 22 Agustus 1998.

BAB XIV. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh kongres.

Bab XV. PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 19

1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh kongres dan atau kongres luar biasa yang khusus diadakan untuk itu.
2. Kongres dan atau Kongres Luar Biasa tersebut diatas dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui oleh 2/3 suara yang hadir.
3. Apabila terjadi pembubaran partai, maka seluruh harta benda milik partai diputuskan pula dalam kongres tersebut.

Bab XVI. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut oleh DPP PAN sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Jakarta, 23 Agustus 1998

Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat
Partai Amanat Nasional.

M. AMIEN RAIS

Ketua Formatur

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI AMANAT NASIONAL

BAB I. KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Yang dapat diterima sebagai anggota PAN adalah seluruh warga negara Republik Indonesia yang telah dewasa, berjiwa reformis, menyetujui dan mendukung platform Partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
2. Setiap orang yang berkeinginan menjadi anggota PAN dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada dewan pimpinan partai yang berdekatan dengan tempat tinggal yang bersangkutan.
3. Dewan Pimpinan Pusat PAN berhak untuk memenuhi dan/atau tidak memenuhi permintaan seseorang sebagai anggota PAN.
4. Terhadap seseorang yang telah disetujui menjadi anggota PAN akan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan PAN di tempat yang bersangkutan semula melakukan pendaftaran.

Pasal 2. Kewajiban Anggota

1. Berakhlak mulia dengan melaksanakan ajaran Agama.

2. Patuh dan setia terhadap ketentuan hukum dan keputusan-keputusan Partai.
3. Menjaga dan mempertahankan kehormatan serta memiliki keterikatan secara lahir dan bathin terhadap partai.
4. Membayar uang iuran anggota.
5. Tidak merangkap sebagai anggota organisasi partai politik lain.
6. Mendukung dan menyukseskan tujuan, usaha dan program perjuangan partai.

Pasal 3. Hak-hak anggota

1. Memperoleh perlakuan yang sama dalam partai.
2. Dipilih dan memilih.
3. Menyatakan pendapat.
4. Membela diri.

Pasal 4. Sanksi organisasi

Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota dan atau pengurus Dewan Pimpinan PAN apabila:

1. Yang bersangkutan nyata-nyata telah melanggar kaedah organisasi PAN.
2. Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik organisasi PAN.

Pasal 5. Bentuk bentuk sanksi

1. Teguran tertulis.

2. Diberhentikan sementara sebagai pengurus PAN.
3. Diberhentikan sementara sebagai anggota dengan dicabut sementara kartu anggotanya.
4. Diberhentikan selamanya sebagai pengurus dan atau anggota.

Pasal 6. Mekanisme pemberian sanksi

1. Bagi Pengurus DPP PAN :

1.1. pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh DPP PAN berdasarkan hasil keputusan Rapat Harian DPP PAN.

1.2. Pemberian Sanksi pemberhentian sementara sebagai pengurus dan atau anggota dan pemberhentian selamanya sebagai pengurus dan atau anggota dilakukan oleh DPP PAN berdasarkan Rapat Pleno DPP PAN.

2. Bagi Pengurus di tingkat Wilayah dilakukan oleh DPW PAN berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno DPW PAN.

3. Bagi Pengurus di tingkat DPD, DPC dan DPRt dilakukan oleh DPW atas permintaan Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno dewan pimpinan setempat.

4. Bagi anggota PAN dilakukan oleh DPW atas permintaan dewan pimpinan setempat.

Pasal 7. Mekanisme pembelaan diri

1. Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis yang dilakukan oleh DPP dapat diajukan kepada Rapat Harian DPP.

2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pengurus dan atau anggota yang dilakukan oleh DPP dapat diajukan kepada Rapat Pleno DPP PAN.
3. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh DPW dapat diajukan kepada DPP yang akan dibicarakan dalam rapat pleno DPP.

Pasal 8. Pemberhentian anggota

Anggota berhenti karena:

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan dengan keputusan dewan pimpinan pusat dan/atau keputusan Dewan Pimpinan Wilayah sebagaimana termaksud dalam pasal 6 di atas.

Pasal 9. Simpatisan

Simpatisan adalah mereka yang berjasa terhadap partai, mendukung tujuan partai akan tetapi belum menjadi anggota namun atas permintaan yang bersangkutan didaftar sebagai simpatisan.

BAB II. PENDIRIAN dan PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 10

1. Pendirian dan Dewan Pimpinan Ranting.
 - 1.1. Pendirian Dewan Pimpinan Ranting dilaksanakan ditingkat kelurahan/desa berdasarkan hasil musyawarah anggota dalam satu kelurahan/desa yang telah memiliki anggota paling sedikit 25 (dua

puluh lima) orang.

1.2. Susunan pengurus berdasarkan hasil musyawarah ranting dimintakan pengesahannya kepada Dewan Pimpinan Daerah disertai dengan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang setempat.

1.3. Apabila dalam satu kelurahan/desa tidak terdapat Dewan Pimpinan Ranting bila dianggap perlu untuk kepentingan partai maka Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Dewan Pimpinan Daerah dapat memprakarsai pendirian ranting.

1.4. Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua, Dewan Pimpinan Ranting dapat melaksanakan Musyawarah Ranting Luar Biasa dengan melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Cabang setempat.

1.5. Dewan Pimpinan Ranting dapat menambah dan/atau mengurangi Anggota Dewan pengurusnya melalui rapat pleno dengan meminta pengesahan kepada Dewan Pimpinan Daerah yang tembusannya dikirim kepada Dewan Pimpinan Cabang.

1.6. Dewan Pimpinan Ranting dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhannya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah partai.

2. Pendirian dan Dewan Pimpinan Cabang

2.1. Pendirian Dewan Pimpinan Cabang dilaksanakan di tingkat kecamatan yang telah memiliki sekurang-kurangnya tiga Dewan

Pimpinan Ranting.

2.2. Susunan pengurus berdasarkan hasil musyawarah cabang dimintakan pengesahannya kepada Dewan Pimpinan Wilayah disertai dengan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah setempat.

2.3. Apabila dalam satu kecamatan belum terbentuk Dewan Pimpinan Cabang, namun dianggap perlu untuk kepentingan partai, maka Dewan Pimpinan Wilayah dapat memprakarsai pendirian cabang dengan melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah.

2.4. Apabila terdapat kekosongan jabatan ketua, maka Dewan Pimpinan Cabang dapat melaksanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa dengan melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah setempat.

2.5. Dewan Pimpinan Cabang dapat menambah dan/atau mengurangi anggota dewan pengurusnya melalui rapat pleno dengan meminta pengesahan kepada Dewan Pimpinan Wilayah yang tembusannya kepada Dewan Pimpinan Daerah.

3. Pendirian dan Dewan Pimpinan Daerah

3.1. Pendirian Dewan Pimpinan Daerah dalam tingkat Kabupaten dan/atau Kotamadya dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah yang telah memiliki sedikitnya tiga Dewan Pimpinan Cabang.

3.2. Pengesahan pendirian Dewan Pimpinan Daerah serta pengurus

terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Daerah dimintakan pengesahannya kepada Dewan Pimpinan Pusat disertai dengan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah setempat.

3.3. Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan/atau Kotamadya setempat.

3.4. Dewan Pimpinan Daerah adalah pemimpin tertinggi yang memimpin partai didaerahnya.

3.5. Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua, maka Dewan Pimpinan Daerah dapat melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa dengan melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah untuk meminta pengesahan pada Dewan Pimpinan Pusat.

3.6. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa maka Dewan Pimpinan Daerah dapat melaksanakan mekanisme rapat kerja daerah dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan tembusannya kepada Dewan Pimpinan Wilayah.

3.7. Dewan Pimpinan Daerah dapat me-nambah dan atau mengurangi Anggota Dewan Pengurusnya melalui rapat pleno dan meminta pengesa-han kepada Dewan Pimpinan Pusat.

3.8. Dewan Pimpinan Daerah dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya asal tidak bertentangan dengan kaedah organisasi.

4. Pendirian dan Dewan Pimpinan Wilayah

4.1. Pendirian Dewan Pimpinan Wilayah dalam tingkat Propinsi dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah yang telah memiliki sekurang-kurangnya tiga Dewan Pimpinan Daerah.

4.2. Pengesahan pendirian Dewan Pimpinan Wilayah serta pengurus terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah dimintakan pengesahannya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

4.3. Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi.

4.4. Dewan Pimpinan Wilayah adalah pemimpin tertinggi yang memimpin Partai diwilayahnya.

4.5. Apabila terdapat kekosongan jabatan ketua, Dewan Pimpinan Wilayah dapat melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa dengan melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat.

4.6. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa maka Dewan Pimpinan Wilayah dapat melaksanakan rapat kerja wilayah dengan meminta pengesahan hasilnya kepada Dewan Pimpinan Pusat .

4.7. Dewan Pimpinan Wilayah dapat menambah dan / atau mengurangi anggota dewan pengurusnya melalui mekanisme Rapat Pleno dan dimintakan pengesahannya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

4.8. Dewan Pimpinan Wilayah dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhannya asal tidak bertentangan dengan kaedah organisasi.

5. Dewan Pimpinan Pusat

5.1. Dewan Pimpinan Pusat adalah pemimpin tertinggi dalam kepemimpinan partai yang melaksanakan dan meneruskan, mengawasi serta menginstruksikan keputusan-keputusan Kongres kepada seluruh Dewan Pimpinan Partai dalam semua tingkatan.

5.2. Dewan Pimpinan Pusat dapat menambah dan/atau mengurangi anggota pimpinannya yang kemudian dimin-takan pengesahannya dalam rapat harian.

5.3. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan peraturan-peraturan khusus maupun pedoman kerja dan/atau pedoman organi-sasi lainnya dalam rangka menjaga ketertiban dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

5.4. Apabila terdapat kekosongan jabatan Ketua Umum, maka pimpinan sementara akan dipimpin secara presidium oleh para ketua-ketua, untuk selanjutnya dilaksanakan Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu .

BAB III. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Pasal 11

1. Pada tingkat DPP, DPW, DPD, DPC dan DPRt dibentuk departemen-departemen dimana lembaga dan pengurusnya ditempatkan berdasarkan profesionalitas.

2. Jumlah dan komposisi departemen di jenjang kepengurusan pada tingkat DPW ke bawah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing akan tetapi tidak boleh melebihi jumlah departemen di tingkat Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IV. BADAN OTONOM DAN LEMBAGA / PANITIA KHUSUS

Pasal 12. Badan Otonom

1. Badan Otonom adalah institusi yang mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri kerja lembaga berlandaskan AD / ART PAN.
2. Badan Otonom dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PAN.
3. Badan Otonom bisa dibentuk di setiap eselon mengacu pada struktur organisasi yang ada di DPP.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan Badan Otonom akan diatur dalam peraturan lebih lanjut.

Pasal 13. Lembaga / Panitia Khusus

5. Lembaga / Panitia Khusus adalah institusi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan partai dalam rangka menjalankan program kerja dan agenda partai.
6. Lembaga / Panitia Khusus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PAN.

7. Lembaga / Panitia Khusus dapat dibentuk di setiap eselon kepengurusan.
8. Hal-hal yang berkaitan dengan Lembaga / Panitia Khusus akan diatur di dalam peraturan lebih lanjut.

BAB V. PERGANTIAN PIMPINAN

Pasal 14

1. Penggantian pimpinan partai dalam semua tingkatan dilaksanakan lima tahun sekali.
2. Penggantian pimpinan pada tingkat DPP dilaksanakan dalam Kongres, penggantian DPW, DPC, DPD dan DPRt dilaksanakan dengan musyawarah di jenjang masing-masing.
3. Serah terima jabatan pimpinan harus dilaksanakan pada akhir acara Kongres /Musyawarah.

BAB VI . PEMILIHAN PIMPINAN

Pasal 15. Kongres

1. Kongres adalah permusyawaratan tertinggi dalam partai yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan sekali lima tahun yang dihadiri oleh peserta Kongres dan anggota Kongres.
2. Peserta Kongres terdiri dari :
 - 2.1. Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

- 2.2. Seluruh pengurus dan anggota MPP Dewan Pimpinan Pusat.
- 2.3. Ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah.
- 2.4. Ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah.
3. Anggota Kongres terdiri dari :
 - 3.1. Undangan Dewan Pimpinan Pusat yang diputuskan oleh rapat pleno DPP sebagai peninjau.
4. Hak suara dan hak bicara
 - 4.1. Hak suara hanya dimiliki oleh peserta Kongres.
 - 4.2. Anggota Kongres hanya memiliki hak bicara akan tetapi tidak memiliki hak suara.
5. Acara pokok kongres adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Laporan pertanggungjawaban DPP tentang: pelaksanaan dan kebijaksanaan, organisasi dan keuangan serta pengesahan laporan DPP terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode.
 - 5.2. Menetapkan dan/atau melakukan perubahan terhadap AD/ART serta peraturan organisasi lainnya.
 - 5.3. Menetapkan program kerja untuk periode berikutnya.
 - 5.4. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum secara langsung. Ketua Umum terpilih secara *ex officio* adalah sebagai ketua formatur.
 - 5.5. Memilih dan menetapkan formatur yang akan menyusun kelengkapan personalia pengurus DPP.
 - 5.6. Formateur berjumlah sebanyak 9 orang, termasuk ketua

formatur.

5.7. Menyusun anggota Majelis Pertimbangan Partai DPP.

5.8. Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kongres.

5.9. Isi dan susunan acara Kongres serta keputusan tentang pelaksanaan Kongres, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan hasil-hasil Rapat Kerja Nasional.

5.10. Selambat lambatnya satu bulan setelah kongres dilaksanakan, pengurus DPP terpilih sudah harus menyampaikan hasil-hasil Kongres kepada seluruh DPW, selanjutnya paling lambat dalam waktu 10 hari setelah diterimanya oleh DPW maka DPW telah harus menyampaikan pula kepada seluruh DPD, demikian pula selanjutnya oleh DPD kepada DPC dan DPRt.

5.11. Keputusan Kongres diberlakukan untuk masa periode kepengurusan selanjutnya.

Bab VII. KORUM dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

1. Kongres dinyatakan sah dan memenuhi korum apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah.
2. Seluruh rapat permusyawaratan selain Kongres dan Kongres Luar Biasa, dinyatakan sah dan dapat berlangsung dengan tidak

memandang jumlah yang hadir asal yang berkepentingan telah diundang yang dapat dibuktikan dengan bukti penerimaan dan atau pengiriman baik secara langsung maupun melalui kantor Pos negara.

Pasal 17. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam semua permusyawaratan diutamakan dengan Musyawarah Mufakat, namun jika Musyawarah Mufakat tidak tercapai dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB VIII. KONGRES LUAR BIASA

Pasal 18

1. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Kongres Luar Biasa diadakan untuk membicarakan masalah masalah yang sifatnya luar biasa yang waktu dan sifatnya tersebut tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Kongres biasa.
3. Peserta Kongres Luar Biasa sama dengan peserta Kongres.
4. Acara pokok Kongres Luar Biasa pada dasarnya sama dengan acara pokok dalam Kongres.
5. Seluruh ketentuan dalam Kongres berlaku pula dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa.

BAB IX. RAPAT- RAPAT

Pasal 19. Rakernas

1. Rapat Kerja Nasional adalah permusyawaratan tertinggi di bawah Kongres yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat, dilaksanakan sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh :

- 1.1. Seluruh pengurus DPP.
- 1.2. Seluruh pengurus MPP DPP.
- 1.3. Ketua MPP Wilayah dan Daerah.
- 1.4. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah.
- 1.5. Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

2. Acara pokok Rapat Kerja Nasional adalah sebagai berikut :

- 2.1. Laporan Dewan Pimpinan Pusat.
- 2.2. Masalah-masalah penting dan aktual yang menyangkut kepentingan partai.
- 2.3. Evaluasi perjalanan partai.
- 2.4. Masalah-masalah yang oleh Kongres diserahkan kepada rapat kerja nasional.
- 2.5. Acara-acara pokok dan persiapan serta masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam Kongres.
- 2.6. Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rapat kerja nasional.
- 2.7. Isi dan susunan acara Rapat Kerja Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 20. Rapat Paripurna

Rapat Paripurna adalah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang dilaksanakan sekali dalam setiap enam bulan, yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan Pusat, dan seluruh anggota MPP DPP , anggota PAN yang duduk dalam Kabinet dan Parlemen.

Pasal 21. Rapat Pleno

Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh semua Anggota Dewan Pimpinan dan Majelis Pertimbangan disetiap jenjang kepartaian, diadakan paling sedikit satu kali dalam waktu tiga bulan.

Pasal 22. Rapat Harian

Rapat Harian dihadiri oleh seluruh pengurus harian disetiap jenjang kepengurusan dalam Partai dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam waktu satu bulan.

Pasal 23. Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi dalam Dewan Pimpinan Wilayah yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Wilayah dilaksanakan sekali lima tahun yang diha-diri oleh peserta Musyawarah Wilayah dan anggota Musyawarah Wilayah.
2. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :

- 2.1. Dewan Pimpinan Pusat (2 orang).
 - 2.2. Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan Wilayah.
 - 2.3. Seluruh pengurus MPP Dewan Pimpinan Wilayah.
 - 2.4. Ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah.
 - 2.5. Ketua, sekretaris dan ditambah 4 orang pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
3. Anggota Musyawarah Wilayah yaitu : Undangan Dewan Pimpinan Wilayah yang diputuskan dalam rapat pleno DPW sebagai peninjau.
4. Hak suara dan hak bicara
- 4.1 Hak suara hanya dimiliki oleh Peserta Musyawarah Wilayah.
 - 4.2 Anggota Musyawarah Wilayah hanya memiliki hak bicara akan tetapi tidak memiliki hak suara.
5. Acara pokok Musyawarah Wilayah adalah sebagai berikut :
- 5.1. Laporan pertanggung jawaban DPW tentang pelaksanaan dan kebijakan organisasi dan keuangan serta pengesahan laporan DPW terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode.
 - 5.2. Menetapkan, melakukan perubahan terhadap peraturan organisasi di wilayahnya.
 - 5.3. Menetapkan Program Kerja untuk periode berikutnya yang mengacu pada keputusan Kongres.
 - 5.4. Pemilihan dan penetapan ketua DPW secara langsung, ketua terpilih secara *ex officio* adalah sebagai ketua formatur.
 - 5.5. Memilih dan menetapkan formatur.

- 5.6. Formatur berjumlah tujuh orang termasuk ketua formatur.
- 5.7. Menyusun anggota Majelis Pertimbangan Partai wilayah.
- 5.8. Dewan Pimpinan Wilayah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Musyawarah Wilayah.
- 5.9. Musyawarah Wilayah dilaksanakan lima tahun sekali.
- 5.10. Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah serta keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Wilayah, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dengan memperhatikan hasil-hasil Rapat Kerja Wilayah.
- 5.11. Selambat-lambatnya satu bulan setelah Musyawarah Wilayah, pengurus DPW terpilih sudah harus menyampaikan hasil-hasil Musyawarah Wilayah kepada seluruh DPD, selanjutnya paling lambat dalam waktu 10 hari setelah diterimanya oleh DPD maka DPD telah harus menyampaikan pula kepada DPC dan DPRt.
- 5.12. Keputusan Musyawarah Wilayah mulai diberlakukan untuk masa kepengurusan selanjutnya.
- 5.13. Musyawarah Wilayah dinyatakan sah dan memenuhi korum apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 24. Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan tertinggi daerah tingkat II

yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Daerah yang dilaksanakan sekali lima tahun yang dihadiri oleh peserta Musyawarah Daerah dan anggota Musyawarah Daerah.

2. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :

- 2.1. Dewan Pimpinan Wilayah (2 orang).
- 2.2. Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
- 2.3. Seluruh pengurus MPP Dewan Pimpinan Daerah.
- 2.4. Ketua dan sekretaris ditambah tiga orang pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang.
- 2.5. Ketua dan sekretaris ditambah tiga orang pengurus DPRt yang dipilih oleh rapat kerja ranting yang khusus yang dilakukan untuk itu.

3. Anggota Musyawarah Daerah terdiri dari :

- 3.1. Undangan Dewan Pimpinan Daerah yang ditetapkan oleh rapat pleno DPD.

4. Hak suara dan hak bicara

- 4.1. Hak suara hanya dimiliki oleh peserta Musyawarah Daerah.
- 4.2. Anggota Musyawarah Daerah hanya memiliki hak bicara akan tetapi tidak memiliki hak suara.

5. Acara pokok Musyawarah Daerah adalah sebagai berikut :

- 5.1. Laporan pertanggungjawaban DPD tentang pelaksanaan dan kebijakan, organisasi dan keuangan serta pengesahan laporan DPD terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode.

- 5.2. Menetapkan, melakukan perubahan terhadap peraturan organisasi di daerahnya.
- 5.3. Menetapkan program kerja untuk periode berikutnya yang mengacu kepada keputusan Kongres dan keputusan Musyawarah Wilayah.
- 5.4. Pemilihan dan penetapan ketua DPD secara langsung. Ketua DPD terpilih secara *ex officio* adalah sebagai ketua formatur.
- 5.5. Memilih dan menetapkan formatur.
- 5.6. Formatur berjumlah sebanyak 7 orang termasuk ketua formatur.
- 5.7. Menyusun anggota Majelis Pertimbangan Partai Daerah.
- 5.8. Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah.
- 5.9. Musyawarah Daerah dilaksanakan lima tahun sekali.
- 5.10. Isi dan susunan acara Musyawarah Daerah serta keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Daerah, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan memperhatikan hasil-hasil Rapat Kerja Daerah.
- 5.11. Selambat lambatnya satu bulan setelah Musyawarah Daerah, Pengurus DPD terpilih sudah harus menyampaikan hasil-hasil Musyawarah Daerah kepada DPW dan seluruh DPC, dan DPRt.
- 5.12. Keputusan Musyawarah Daerah diberlakukan untuk masa

kepengurusan selanjutnya.

5.13. Musyawarah Daerah dinyatakan sah dan memenuhi korum apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari Musyawarah Daerah.

Pasal 25. Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi dalam satu kecamatan yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Cabang yang dilaksanakan sekali lima tahun yang dihadiri oleh peserta Musyawarah Cabang dan Anggota Musyawarah Cabang.

2. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari :

2.1. Dewan Pimpinan Wilayah (2 orang).

2.2. Dewan Pimpinan Daerah (2 orang).

2.3. Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang.

2.4. Seluruh pengurus MPP cabang.

2.5. Ketua dan sekretaris ditambah lima orang Dewan Pimpinan Ranting.

3. Anggota Musyawarah Cabang terdiri dari :

3.1. Undangan Dewan Pimpinan cabang yang diputuskan oleh rapat pleno DPC sebagai peninjau.

4. Hak Suara dan Hak Bicara

4.1. Hak suara hanya dimiliki oleh peserta Musyawarah Cabang

4.2. Anggota Musyawarah Cabang hanya memiliki hak bicara akan tetapi tidak memiliki hak suara.

5. Acara pokok Musyawarah Cabang adalah sebagai berikut :
- 5.1. Laporan pertanggungjawaban DPC tentang pelaksanaan dan kebijaksanaan, organisasi dan keuangan serta pengesahan laporan DPC terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode.
 - 5.2. Menetapkan, melakukan perubahan terhadap peraturan organisasi cabangnya.
 - 5.3. Menetapkan Program kerja untuk periode berikutnya yang mengacu pada keputusan Kongres dan keputusan Musyawarah Wilayah, keputusan Musyawarah Daerah.
 - 5.4. Pemilihan dan penetapan Ketua DPC secara langsung. Ketua terpilih secara ex officio adalah sebagai Ketua formatur.
 - 5.5. Memilih dan menetapkan Formatur.
 - 5.6. Formatur berjumlah sebanyak 7 orang termasuk Ketua formatur.
 - 5.7. Menyusun Anggota Majelis Pertimbangan Partai Cabang.
 - 5.8. Dewan Pimpinan Cabang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Musyawarah Cabang.
 - 5.9. Musyawarah Cabang dilaksanakan lima tahun sekali.
 - 5.10. Isi dan susunan acara Musyawarah Cabang serta keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Cabang, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan pertimbangan Rapat Kerja Cabang.
 - 5.11. Selambat-lambatnya satu bulan setelah Musyawarah Cabang, maka pengurus DPC terpilih sudah harus menyampaikan hasil-hasil Musyawarah Cabang kepada DPW, DPD dan seluruh Dewan Pimpinan

Ranting.

5.12. Keputusan Musyawarah Cabang mulai diberlakukan untuk masa kepengurusan selanjutnya.

5.13. Musyawarah Cabang dinyatakan sah dan memenuhi korum apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari peserta Musyawarah Cabang tersebut.

Pasal 26. Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Ranting adalah Permusyawaratan tertinggi dalam Kelurahan/Desa yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Ranting yang dilaksanakan sekali lima tahun yang dihadiri oleh peserta Musyawarah Ranting dan Anggota Musyawarah Ranting.

2. Peserta Musyawarah Ranting terdiri dari :

2.1. Dewan Pimpinan Daerah (2 orang).

2.2. Dewan Pimpinan Cabang (2 orang).

2.3. Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Ranting.

2.4. Seluruh pengurus MPP Ranting.

2.5. Seluruh anggota partai yang ada di tingkat ranting.

3. Anggota Musyawarah Ranting terdiri dari :

3.1. Undangan Dewan Pimpinan Ranting yang ditetapkan oleh rapat pleno DPRt.

4. Hak suara dan hak bicara,

4.1. Hak suara hanya dimiliki oleh peserta Musyawarah Ranting.

4.2. Anggota Musyawarah Ranting hanya memiliki hak bicara akan tetapi

tidak memiliki hak suara.

5. Acara pokok Musyawarah Ranting adalah sebagai berikut :

5.1. Laporan pertanggungjawaban DPRt tentang pelaksanaan dan kebijaksanaan, organisasi dan keuangan serta pengesahan laporan DPRt terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode.

5.2. Menetapkan, melakukan perubahan terhadap peraturan organisasi rantingnya.

5.3. Menetapkan program kerja untuk periode berikutnya yang mengacu kepada keputusan Kongres dan keputusan Musyawarah Wilayah, keputusan Musyawarah Daerah dan Keputusan Musyawarah Cabang.

5.4. Pemilihan dan penetapan Ketua DPRt secara langsung. Ketua terpilih secara ex officio adalah sebagai Ketua Formatur.

5.5. Memilih dan menetapkan Formatur.

5.6. Formatur berjumlah sebanyak 5 orang termasuk Ketua formatur.

5.7. Menyusun Anggota Majelis Pertimbangan Partai dalam tingkat DPRt.

5.8. Dewan Pimpinan Ranting bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Musyawarah Ranting.

5.9. Musyawarah Ranting dilaksanakan lima tahun sekali.

5.10. Isi dan susunan acara musyawarah ranting serta keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Ranting, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting dengan memperhatikan pertimbangan rapat kerja ranting.

5.11. Selambat lambatnya satu bulan setelah Musyawarah Ranting,

pengurus DPRt terpilih sudah harus menyampaikan hasil-hasil Musyawarah Ranting kepada seluruh anggota partai serta Dewan Pimpinan Cabang.

5.12. Keputusan Musyawarah Ranting mulai diberlakukan untuk masa periode kepengurusan selanjutnya.

5.13. Musyawarah Ranting dinyatakan sah dan memenuhi korum apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari peserta Musyawarah Ranting tersebut.

Pasal 27. Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1.1. DPW atas permintaan 2/3 dari DPD.

1.2. Bagi DPD atas permintaan 2/3 dari DPC.

1.3. Bagi DPC atas permintaan 2/3 dari DPRt.

1.4. Bagi DPRt atas permintaan 2/3 dari jumlah Anggota Pimpinan Ranting.

BAB X. STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 28.

1. Susunan Dewan Pimpinan Pusat untuk pertama kali adalah sebagai berikut :

1. Ketua Umum
2. Ketua - ketua
3. Sekretaris Jenderal
4. Wakil - wakil Sekretaris Jenderal
5. Bendahara Umum
6. Bendahara
7. Dewan Ekonomi :
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Anggota
8. Majelis Pertimbangan Partai :
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Anggota
9. Departemen Kaderisasi, keanggotaan Organisasi.
10. Departemen Kampanye dan pemenangan Pemilu.
11. Departemen Humas / Media Massa.
12. Departemen Hubungan Internasional.
13. Departemen Buruh, Tani, Nelayan.
14. Departemen Perhubungan/Telekomunikasi.
15. Departemen Pendidikan.

16. Departemen Sumber Daya Alam dan Energi.
17. Departemen Agama.
18. Departemen Perlindungan Konsumen.
19. Departemen Hukum dan Keadilan.
20. Departemen Kesehatan.
21. Departemen Kebudayaan dan Kesenian.
22. Departemen Pemberdayaan Perempuan.
23. Departemen lingkungan Hidup.
24. Departemen Agraria.
25. Departemen Pemuda dan Olah Raga.
26. Departemen Penelitian dan Pengembangan.
27. Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
28. Departemen Wirausaha dan Koperasi.
29. Departemen Sosial.
30. Pengurus setiap departemen terdiri dari kepala departemen, wakil kepala, dan anggota.

2. Di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting adalah sebagai berikut:

- 2.1. Ketua
- 2.2. Wakil-wakil ketua
- 2.3. Sekretaris
- 2.4. Wakil-wakil sekretaris
- 2.5. Bendahara

2.6. Wakil-wakil bendahara

2.7. Majelis Pertimbangan Partai

- Ketua
- Wakil ketua
- Sekretaris
- Anggota

2.8. Departemen-departemen sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

BAB. XI. MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI

Pasal 29

1. MPP melaksanakan persidangan sedikitnya setiap enam bulan sekali.
2. Pengurus MPP dipilih dari anggota MPP setiap lima tahun sekali.
3. MPP berada pada setiap Dewan Pimpinan Partai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting.
4. MPP memberikan nasihat kepada pengurus Dewan Pimpinan Partai setiap saat jika dianggap penting dan perlu baik diminta maupun tidak.
5. MPP ikut mengawasi pelaksanaan hasil-hasil Musyawarah.
6. Tugas, kewajiban serta kewenangan dari MPP akan ditentukan lebih lanjut dalam pedoman organisasi.

BAB XII. LOGO dan LAMBANG PARTAI

Pasal 30

1. Filosofi Logo :

Matahari putih yang bersinar cerah dilatarbelakangi segi empat warna biru dengan tulisan PAN dibawahnya, merupakan simbolisasi bahwa Partai Amanat Nasional membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

2. Makna Logo :

Simbol Matahari yang bersinar terang :

Matahari merupakan sumber cahaya, sumber kehidupan. Warna putih adalah ekspresi dari kebenaran, keadilan dan semangat baru.